



LAPORAN KINERJA Tahun 2023

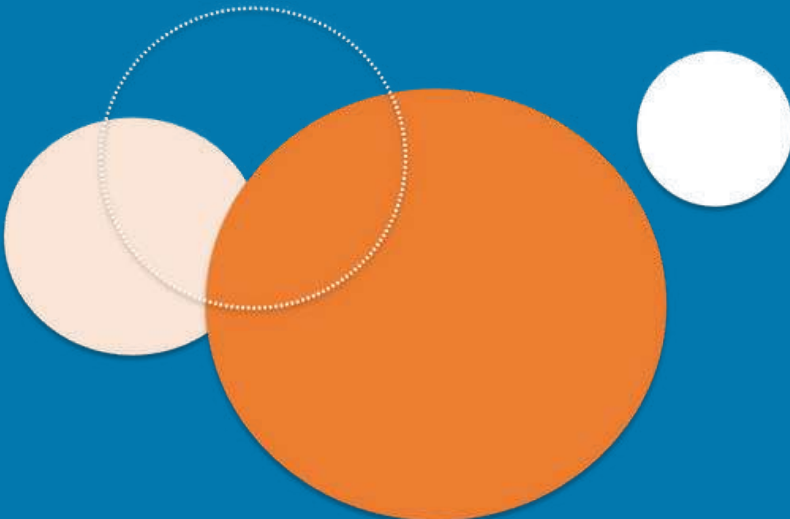
**Sekretariat Direktorat Jenderal
Perundingan Perdagangan Internasional**



Laporan Kinerja



2023



Kata Pengantar

Pada Tahun 2023, Setditjen PPI terus berusaha mendukung pencapaian sasaran strategis berupa penurunan hambatan akses pasar di negara mitra, serta implementasi dan peningkatan pemahaman perundingan perdagangan internasional. Setditjen PPI terus berupaya semaksimal mungkin mendukung perundingan dan pemanfaatan perundingan agar seluruh perundingan dapat terselenggara dengan baik dan mencapai tujuan yang disepakati bersama. Dukungan penyelenggaraan perundingan yang telah dilakukan adalah penyelenggaraan sidang dalam negeri perundingan perdagangan internasional dan sidang Keketuaan Indonesia di ASEAN.

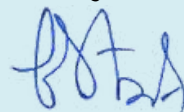
Setditjen PPI juga mendukung implementasi dan penyebarluasan informasi hasil perundingan kepada masyarakat luas agar hasil perundingan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pemangku kepentingan. Salah satu dukungan Setditjen PPI pada Tahun 2023 adalah ratifikasi perjanjian perdagangan. Pada Tahun 2023, terdapat dua perjanjian yang berhasil disahkan yaitu ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA) dan Indonesia - UAE CEPA. Setditjen PPI juga menyebarluaskan seluruh perjanjian perdagangan tersebut dan perjanjian lainnya melalui website FTA Center, kegiatan sosialisasi melalui kegiatan seminar, Focus Group Discussion, dan berita di media massa maupun media sosial. Setditjen PPI juga terus berupaya memberikan layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini secara garis besar menggambarkan pelaksanaan program dan kegiatan Setditjen PPI selama Tahun 2023 dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi serta sebagai wujud pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran strategis yang ditetapkan dalam (i) Rencana Strategis Ditjen PPI Tahun 2020-2024; (ii) Rencana Kerja Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2023; dan (iii) Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2023.

Besar harapan kami, laporan ini menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja Sekretariat Ditjen PPI, dan mendorong peningkatan kinerja bagi organisasi dan seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Ditjen PPI di masa mendatang.

Jakarta, 14 Maret 2023
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perundingan Perdagangan Internasional,



Basaria Tiara L. Gaol

Ringkasan Eksekutif

Sebagai salah satu unit eselon II yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Ditjen PPI), Sekretariat Ditjen PPI mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi Direktorat Jenderal. Pada tahun 2023, secara keseluruhan Sekretariat Ditjen PPI telah menetapkan 8 indikator kinerja dari 3 sasaran yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2023 dan merupakan tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Dari delapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tersebut, tujuh diantaranya tercapai dan bahkan ada yang melampaui target. Sedangkan satu Indikator Kinerja Kegiatan, realisasinya di bawah target. Realisasi yang berada di bawah target tersebut adalah IKK-1 "Jumlah barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia (i.e mendapatkan preferential tariff) baik di bilateral maupun regional" pada sasaran kinerja "Menurunnya hambatan akses pasar di negara mitra". Jumlah pos tarif dari barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia tahun 2023 kurang dari yang ditargetkan. Hal ini karena pada tahun 2023 terdapat satu perjanjian perdagangan yang berhasil ditandatangani yaitu Indonesia-Iran PTA, di mana cakupan skema PTA tidak seluas pada skema CEPA yang dapat mengakomodir cakupan pos tarif yang lebih luas. Selain itu pada tahun 2023, Indonesia juga telah menyelesaikan satu perjanjian perdagangan yang telah conclude yaitu Protokol Perubahan Indonesia-Japan EPA.

Bagaimanapun, keberhasilan dari proses perundingan perdagangan internasional tidak hanya sampai pada kesepakatan eliminasi pos tarif, namun pemanfaatan atas perjanjian tersebut. Oleh karena itu, di tengah tantangan proses percepatan penyelesaian perundingan, pada tahun 2023 Ditjen PPI berfokus pada penyelesaian ratifikasi perjanjian perdagangan internasional, penyebaran informasi hasil-hasil perundingan, serta fasilitasi FTA Center sehingga mendorong pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian rata-rata Sekretariat Ditjen PPI pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan kinerja PPI pada tahun 2022, yaitu dari 264,7 persen menjadi 117,63 persen. Penurunan ini disebabkan karena terdapat satu indikator yang sangat dominan capaiannya (anomali) pada tahun 2022, yaitu jumlah pos tarif dari barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia. Sementara itu pada tahun 2023, capaian jumlah pos tarif dari barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia di bawah target yang telah ditetapkan.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2023, Sekretariat Ditjen PPI telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp141.092.401.000,- yang kemudian direvisi menjadi Rp139.939.952.000,- Anggaran yang dapat direalisasikan di tahun 2023 oleh Ditjen PPI adalah Rp137.852.912.884,- dengan capaian sebesar 98,51 persen.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	02
RINGKASAN EKSEKUTIF	03
DAFTAR ISI	04
DAFTAR TABEL	05
DAFTAR GAMBAR	06

BAB I

PENDAHULUAN	07
LATAR BELAKANG	10
TUJUAN	10
STRUKTUR ORGANISASI	11
PERAN STRATEGIS ORGANISASI	12
ISU STRATEGIS	12

BAB II

PERENCANAAN KINERJA	14
RENCANA STRATEGIS	15
RENCANA KERJA	18
PEJANJIAN KINERJA	19

BAB III

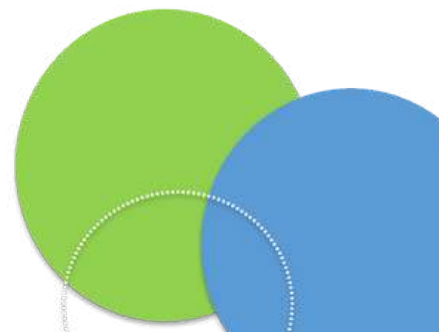
AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	21
B. KINERJA ANGGARAN	55

BAB IV

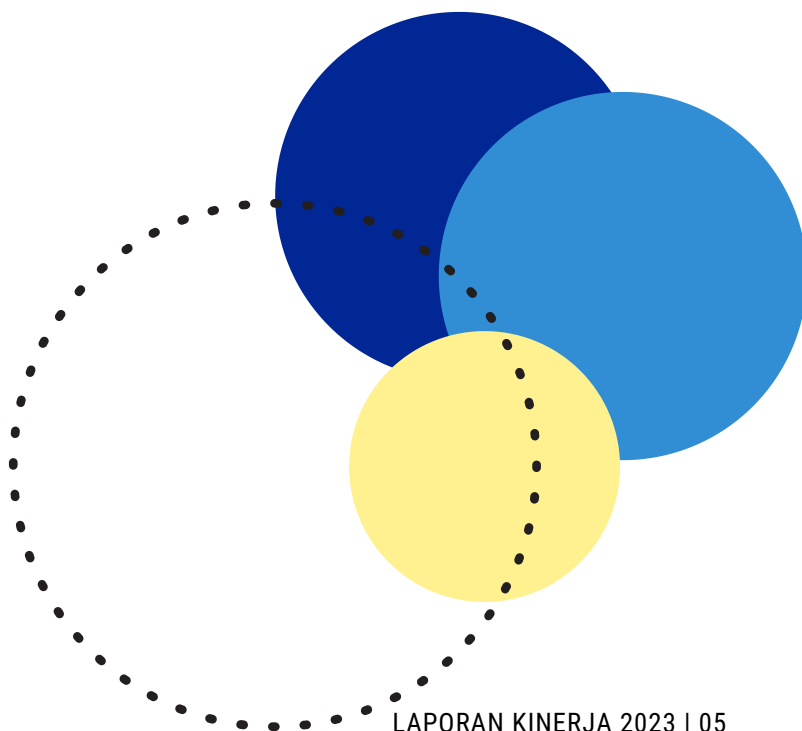
PENUTUP	57
KESIMPULAN	58
REKOMENDASI	59

LAMPIRAN

Lampiran 1	61
Formulir Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Tahun 2020-2024	
Lampiran 2	63
Perjanjian Kinerja Ditjen PPI 2023	
Lampiran 3	64
Lampiran Perjanjian Kinerja Ditjen PPI 2023	
Lampiran 4	65
Formulir Pengukuran Pencapaian Kinerja Sekretariat Ditjen PPI	

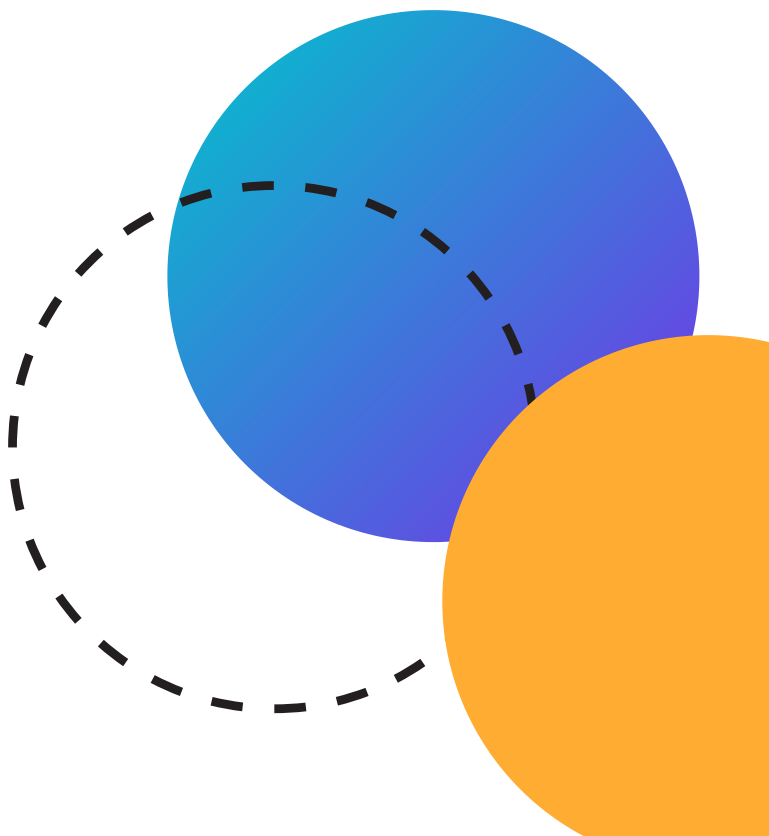


Tabel 1. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional 2020 - 2024	17
Tabel 2. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PPI 2020-2024	18
Tabel 3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2023	21
Tabel 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2023 dengan Tahun - Tahun Sebelumnya	23
Tabel 5. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1	24
Tabel 6. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2	27
Tabel 7. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3	33
Tabel 8. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 4	38
Tabel 9. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 5	42
Tabel 10. Indikator Pelaksanaan Anggaran Ditjen PPI Tahun 2023	51
Tabel 11. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 6	52
Tabel 12. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 7	53
Tabel 13. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 8	54
Tabel 14. Alokasi Anggaran Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2023	55
Tabel 15. Perbandingan Realisasi Anggaran Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2022 dan Tahun 2023	55
Tabel 16. Realisasi Anggaran Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2023 Berdasarkan Sasaran	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen PPI	12
Gambar 2. Layanan FTA Center Tahun 2020 - 2023	39
Gambar 3. Total Layanan FTA Center Tahun 2023 di Jakarta, Bandung, dan Semarang	40
Gambar 4. Peta Proses Bisnis di Lingkungan Ditjen PPI	47



1

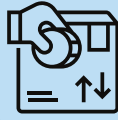
Pendahuluan

Dalam rangka mendukung tugas tersebut dan guna mewujudkan visi dan misi, sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh Ditjen PPI dalam Rencana Strategis, maka secara umum Sekretariat Ditjen PPI melaksanakan tugas melalui peningkatan peran dan pemanfaatan perundingan perdagangan internasional serta dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya sehingga tercipta sinergi antara unit eselon II yang ada di lingkungan direktorat jenderal.



Pencapaian Utama

Key Achievements



**JUMLAH BARANG YANG
MASUK DI DALAM PERJANJIAN
PERDAGANGAN INDONESIA (I.E
MENDAPATKAN
PREFERENTIAL TARIFF) BAIK
DI BILATERAL MAUPUN
REGIONAL**

351

Pos tarif yang disepakati dalam perjanjian perdagangan internasional Indonesia-Iran PTA dan Indonesia-Japan EPA. Melalui kesepakatan Indonesia-Iran PTA, Indonesia akan mendapatkan tarif preferensi atas 239 pos tarif (PT) dan melalui Indonesia-Japan EPA (Protokol Perubahan), Jepang membuka dan memperbaiki akses pasar untuk 112 pos tarif



**FASILITASI PROSES RATIFIKASI
PERUNDINGAN PERDAGANGAN
INTERNASIONAL**

7

ASEAN Trade In Services Agreement;
Indonesia-UAE CEPA
Indonesia - Chile CEPA
International Coffee Agreement
Indonesia - Iran PTA
Indonesia - Malaysia BTA
TPS of the Organization of Islamic Cooperation



**JUMLAH PELAKU USAHA YANG
MENDAPATKAN INFORMASI HASIL
PERUNDINGAN**

2.150

Selama tahun 2023, sosialisasi dilaksanakan di 20 kota di Indonesia antara lain Garut, Tangerang, Nunukan, Ambon, Tarakan, Maluku Tengah, Yogyakarta dan lain-lain



**JUMLAH PELAKU USAHA YANG
MEMANFAATKAN FTA CENTER**

1.474

Capaian ini didukung oleh kegiatan di Ditjen PPI yaitu FTA Center di 3 Kota yaitu Jakarta, Bandung dan Semarang dan Coching Clinic yang diselenggarakan di daerah.



**INDEKS REFORMASI BIROKRASI (RB)
DITJEN PPI**

84,58

Hasil perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi diperoleh berdasarkan penilaian indikator enam area perubahan: Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan dan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan



**INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN
ANGGARAN (IKPA) DITJEN PPI**

92,27

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PPI pada Tahun Anggaran 2023 sebesar 92,27. Nilai ini merupakan kompilasi dari 8 indikator yang masing-masing mencerminkan kualitas perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawab setiap Satuan Kerja



**NILAI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DITJEN
PPI**

81,46

Skor tingkat implementasi SAKIP Ditjen PPI 81,46 dengan predikat A (Memuaskan). Hal ini secara umum dapat diinterpretasikan bahwa implementasi SAKIP dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil.



**NILAI KEPUASAN STAKEHOLDER
DITJEN PPI**

80,01

Hasil survei menunjukkan bahwa stakeholder merasa puas atas pelayanan yang dilakukan oleh Setditjen PPI

LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kementerian atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja merupakan suatu tahapan yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, pada bulan April 2014 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan perbaikan dari Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam kedua peraturan tersebut dijelaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya, termasuk pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis.



Pertanggungjawaban dimaksud dilaporkan kepada pemberi mandat, pimpinan masing-masing instansi, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden.

TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam satu tahun anggaran. Pelaporan atas capaian kinerja di lingkungan Sekretariat Ditjen PPI telah dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan agar dapat diambil suatu tindakan perbaikan atau antisipasi apabila ditemukan adanya penyimpangan terhadap perencanaan kinerja. Pada akhirnya, proses pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan baik dan selaras dengan tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Ditjen PPI yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Ditjen PPI dan Direktur Jenderal PPI.

Sekretariat Ditjen PPI merupakan unit pendukung baik secara administratif maupun teknis lainnya kepada seluruh satuan unit organisasi yang ada di bawah Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. Dasar hukum organisasi tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.



Dalam rangka mendukung tugas tersebut dan guna mewujudkan visi dan misi, sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh Ditjen PPI dalam Rencana Strategis, maka secara umum Sekretariat Ditjen PPI melaksanakan tugas melalui peningkatan peran dan pemanfaatan perundingan perdagangan internasional serta dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya sehingga tercipta sinergi antara unit eselon II yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal.

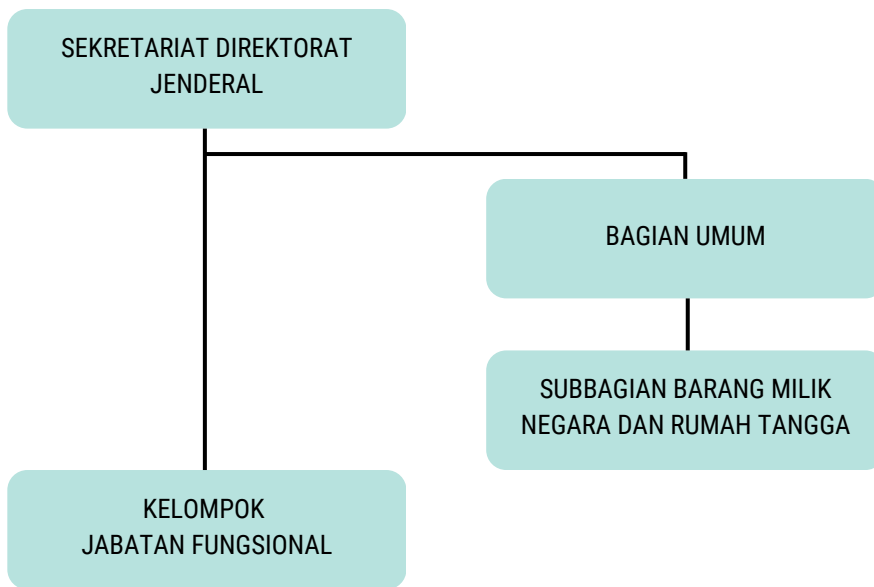
Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut maka disampaikan dalam bentuk pelaporan secara berkala (triwulan), selanjutnya pada triwulan keempat disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja (LAPKIN) Sekretariat Ditjen PPI Tahun Anggaran 2022.

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Permendag Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Sekretariat Ditjen PPI selaku salah satu unit di bawah Ditjen PPI mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Ditjen PPI menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan program, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
2. Pelaksanaan urusan kerja sama di bidang perundingan perdagangan internasional;
3. Pelaksanaan urusan keuangan Direktorat Jenderal;
4. Penyusunan telaahan hukum, rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perundingan perdagangan internasional;
5. Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
6. Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi jabatan fungsional bidang perundingan perdagangan internasional;
7. Pelaksanaan urusan barang milik negara; dan
8. Pelaksanaan urusan perlengkapan, rumah tangga, tata usaha, tata persuratan dan dokumentasi Direktorat Jenderal.

Struktur organisasi Sekretariat Ditjen PPI terdiri dari beberapa kelompok jabatan fungsional sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah.



Sumber: Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan,

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen PPI

PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Sebagaimana visi misi Presiden yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, Kementerian Perdagangan memiliki tugas untuk meningkatkan kinerja perdagangan luar negeri, meningkatkan kinerja perdagangan dalam negeri dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

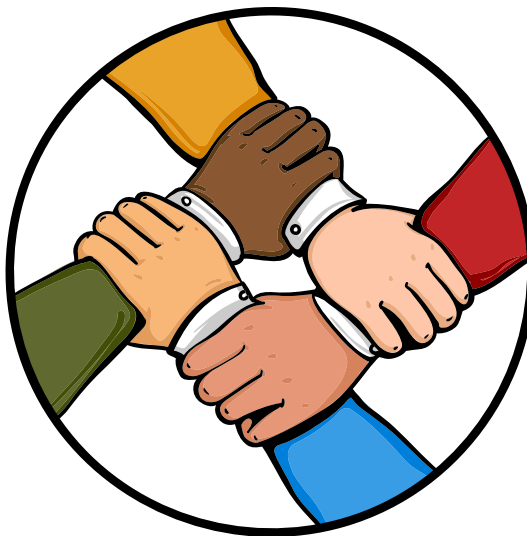
Ditjen PPI memiliki peranan dalam meningkatkan akses pasar produk Indonesia di pasar internasional, melindungi kepentingan nasional di forum-forum perdagangan internasional, melindungi Indonesia dari praktik-praktik perdagangan internasional yang tidak adil, meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi dalam negeri yang menunjang pelaksanaan perundingan perjanjian perdagangan internasional, dan meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan perundingan perdagangan internasional oleh masyarakat Indonesia.

Untuk mendukung peran tersebut maka Ditjen PPI perlu dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya. Hal ini merupakan unsur penunjang bagi kelancaran terselenggaranya kegiatan pada Ditjen PPI. Demi menjamin kelancaran penyelenggaraan kegiatan maka senantiasa dilakukan peningkatan tata kelola yang baik. Penyelenggaraan dukungan tersebut harus terus dikembangkan dan diimplementasikan agar sejalan dengan reformasi birokrasi, penerapan pemerintahan yang baik (*good governance*).

ISU STRATEGIS

Isu strategis dalam peningkatan peran dan pemanfaatan perundingan perdagangan internasional serta dukungan manajemen dan dukungan teknis yang dilakukan oleh Sekretariat Ditjen PPI antara lain:

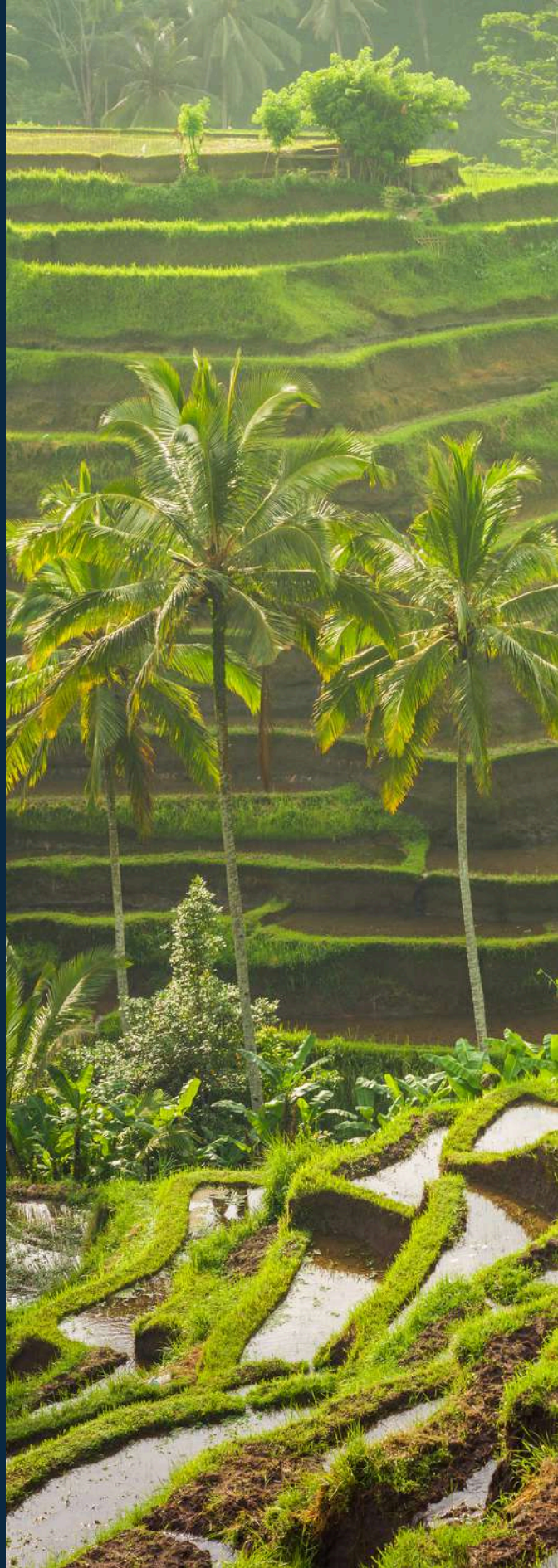
1. Penguatan komunikasi dan koordinasi baik secara internal dengan seluruh unit di lingkungan Ditjen PPI, maupun secara eksternal dengan K/L mitra seperti Bappenas, Kemenkeu, dan KemenPAN&RB dalam hal perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Peningkatan fasilitasi proses penyiapan dan tindak lanjut perundingan perdagangan internasional di antaranya dukungan terhadap kajian atau analisis sebagai pendukung perundingan; intensifikasi komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka proses ratifikasi dan implementasi perjanjian perundingan perdagangan internasional yang disepakati; serta efektivitas penyebaran informasi hasil-hasil perundingan perdagangan kepada para pelaku usaha dan eksportir di berbagai daerah.
3. Penguatan kelembagaan FTA Center di antaranya melalui koordinasi dan evaluasi yang berkelanjutan, pembekalan kepada para tenaga ahli mengenai update kebijakan dan peluang-peluang baru dari K/L terkait, serta kajian evaluasi dan pengembangan FTA Center bekerja sama dengan universitas.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Ditjen PPI, dengan melakukan pengembangan dan pembinaan pegawai melalui pelatihan, training, workshop dan lainnya sebagai upaya untuk mendukung kinerja organisasi. Pengembangan SDM juga didukung pengelolaan dan pengembangan jabatan fungsional yang ada di lingkungan Ditjen PPI.



2

Perencanaan Kinerja

Keterkaitan atas visi, misi, tujuan Sekretariat Ditjen PPI diterjemahkan secara operasional dengan 3 (tiga) sasaran program yang mencakup: (i) Menurunnya hambatan akses pasar di negara mitra; (ii) Meningkatnya implementasi dan pemahaman perundingan perdagangan internasional; (iii) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kelembagaan Ditjen PPI.



Rencana Strategis

VISI INDONESIA 2020-2024

Berdasarkan RPJMN tahun 2020 – 2024, visi pemerintahan Indonesia tahun 2020 – 2024

**Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong**

MISI INDONESIA 2020-2024

Misi pemerintahan periode 2020 – 2024 dikenal sebagai Nawacita Kedua

- 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia**
- 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;**
- 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;**
- 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;**
- 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;**
- 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;**
- 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;**
- 8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya; dan**
- 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.**

MISI KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2020-2024

Untuk menjembatani visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2020-2024 dalam melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional, Kementerian Perdagangan sebagaimana dikemukakan pada Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024, memiliki 3 (tiga) misi dalam membangun sektor perdagangan yaitu:

- 1. Meningkatkan kinerja perdagangan luar negeri**
- 2. Meningkatkan kinerja perdagangan dalam negeri**
- 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di sektor perdagangan**

Dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Republik Indonesia serta misi Kementerian Perdagangan, Ditjen PPI mengemban 5 (lima) misi, sebagai berikut:

MISI



Meningkatkan akses pasar Indonesia di pasar Internasional melalui perundingan perdagangan internasional



Menjaga kepentingan Indonesia dalam tata aturan perdagangan dunia melalui proses perundingan perdagangan internasional



Melindungi Indonesia dari praktik-praktik perdagangan internasional yang tidak adil



Mendorong implementasi hasil-hasil perundingan perdagangan internasional dalam tata aturan nasional agar dapat dimanfaatkan secara optimal



Mendorong pemanfaatan hasil-hasil perundingan dan perjanjian perdagangan internasional sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat

Dalam rangka mendukung tujuan Kementerian Perdagangan yaitu “Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa”, maka Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional pada tahun 2020 – 2024 memiliki tujuan yaitu:

TUJUAN

1

Peningkatan akses pasar produk Indonesia di pasar internasional

2

Perlindungan kepentingan nasional di forum-forum perdagangan internasional

3

Perlindungan bagi masyarakat Indonesia dari praktik-praktik perdagangan internasional yang tidak adil

4

Peningkatan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi dalam negeri yang menunjang pelaksanaan perundingan perjanjian perdagangan internasional

5

Peningkatan pemahaman dan pemanfaatan perundingan perdagangan internasional oleh masyarakat Indonesia

Mengingat Sekretariat Ditjen PPI merupakan unit eselon II di bawah Ditjen PPI, maka perencanaan kinerja Sekretariat Ditjen PPI mengacu pada Renstra Ditjen PPI. Turunan selanjutnya dari sasaran program direpresentasikan dalam 3 (tiga) sasaran kegiatan dan 8 (delapan) indikator kinerja kegiatan disertai dengan target yang tercantum pada Renstra Ditjen PPI Tahun 2020-2024.

Sekretariat Ditjen PPI melaksanakan dua kegiatan, yaitu (1) Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional; dan (2) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Kegiatan tersebut diuraikan pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 1. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional 2020 - 2024

Sasaran/Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Menurunnya hambatan akses pasar di negara mitra					
IKK 1 - Jumlah barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik di bilateral maupun regional. (i.e. mendapatkan preferential tariff)	500	500	500	500	500
Meningkatnya implementasi dan pemahaman perundingan perdagangan internasional					
IKK 2 - Fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional	5	5	5	5	5
IKK 3 - Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi hasil perundingan	150	1.000	1.000	1.000	1.000
IKK 4 - Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Center	601	1.000	1.000	1.000	1.000

Sumber: Rencana Strategis Ditjen PPI Tahun 2020 - 2024

Tabel 2. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional 2020-2024

Sasaran/Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kelembagaan Ditjen PPI					
Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	80	80	80	80	80
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	90	90	90	90
Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Ditjen PPI	80	80	80	80	80
Penilaian Kepuasan Stakeholder Ditjen PPI	80	80	80	80	80

Sumber: Rencana Strategis Ditjen PPI Tahun 2020 - 2024

Keterkaitan atas visi, misi, tujuan Sekretariat Ditjen PPI diterjemahkan secara operasional dengan 3 (tiga) sasaran program yang mencakup: (i) Menurunnya hambatan akses pasar di negara mitra; (ii) Meningkatnya implementasi dan pemahaman perundingan perdagangan internasional; (iii) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kelembagaan Ditjen PPI.

Rencana Kerja

Sebagai turunan dari Rencana Strategis Ditjen PPI Tahun 2020-2024 disusun Rencana Kerja Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2023 untuk menjabarkan perencanaan kegiatan dan kinerja pada tahun 2023. Rencana Kerja Sekretariat Ditjen PPI terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu:

1. Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional;
2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan perwujudan kesepakatan antara Sekretaris Ditjen PPI dengan Direktur Jenderal PPI dalam menetapkan kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Ditjen PPI Tahun 2020-2024. Perjanjian Kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Sekretaris Ditjen PPI telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang mencakup Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Satuan, Target, dan Anggaran. Perjanjian Kinerja tersebut akan menjadi acuan dalam pengukuran capaian kinerja dalam pelaporan kinerja Sekretariat Ditjen PPI tahun 2023, di mana secara keseluruhan terdapat 3 (tiga) sasaran dengan 8 (delapan) indikator yang telah ditetapkan.



3

Akuntabilitas Kinerja

Pada tahun 2023, Sekretariat Ditjen PPI telah menetapkan 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan 8 (delapan) indikator kinerja kegiatan yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran organisasi.



A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada tahun 2023, Sekretariat Ditjen PPI telah menetapkan 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan 8 (delapan) indikator kinerja kegiatan yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran organisasi. Pengukuran capaian masing-masing indikator kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi tahun 2023 dengan target 2023 sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2023

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional					
1	Menurunnya hambatan akses pasar di negara mitra				
	Jumlah barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia (i.e. mendapatkan preferential tariff) baik di bilateral maupun regional.	Pos Tarif	500	351	70
2	Meningkatnya implementasi dan pemahaman perundingan perdagangan internasional				
	Fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional	Ratifikasi	7	7	100
	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi hasil perundingan	Pelaku Usaha	1000	2.150	215
	Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Center	Pelaku Usaha	1000	1.474	147
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional					
3	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kelembagaan Ditjen PPI				
	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Indeks	80	84,58	105
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	90	92,27	102
	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Ditjen PPI	Nilai	80	81,46	102
	Penilaian Kepuasan Ditjen PPI	Nilai	80	80,01	100
	Rata-Rata Capaian Tahun 2023				117,63
	Rata-Rata Capaian Tahun 2022				264,70

Sumber: Ditjen PPI (2024)

Pengukuran pencapaian sasaran meliputi penetapan indikator sasaran, penetapan rencana tingkat capaian (target), penghitungan realisasi indikator sasaran, dan perbandingan target dan realisasi untuk mendapatkan persentase capaian untuk masing-masing indikator. Dalam mengukur capaian kinerja digunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dari hasil penghitungan capaian, menunjukkan bahwa rata-rata capaian tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022 di mana rata-rata capaian tahun 2023 sebesar 117,63 persen dan capaian tahun 2022 sebesar 264,70 persen. Penurunan capaian sebesar 147 persen tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Pada tahun 2023 terdapat satu Indikator Kinerja Kegiatan yang realisasinya di bawah target. Realisasi yang berada di bawah target tersebut adalah IKK-1 “Jumlah barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia (i.e mendapatkan preferential tariff) baik di bilateral maupun regional” pada sasaran kinerja “Menurunnya hambatan akses pasar di negara mitra”. Jumlah pos tarif dari barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia tahun 2023 kurang dari yang ditargetkan. Hal ini karena pada tahun 2023 terdapat satu perjanjian perdagangan yang berhasil ditandatangani yaitu Indonesia-Iran PTA, di mana cakupan skema PTA tidak seluas pada skema CEPA yang dapat mengakomodir cakupan pos tarif yang lebih luas. Realisasi tersebut juga didukung oleh satu perjanjian perdagangan yang telah conclude yaitu Protokol Perubahan Indonesia-Japan EPA.



Tabel 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	Realisasi			
				2020	2021	2022	2023
Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional							
1	Menurunnya hambatan akses pasar di negara mitra						
	Jumlah barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia (i.e. mendapatkan preferential tariff) baik di bilateral maupun regional.	Pos Tarif	500	783	0	7.124	351
2	Meningkatnya implementasi dan pemahaman perundingan perdagangan internasional						
	Fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional	Ratifikasi	7	7	9	7	7
	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi hasil perundingan	Pelaku Usaha	1000	150	820	500	2.150
	Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Center	Pelaku Usaha	1000	3.047	1.077	1000	1.474
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional							
3	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kelembagaan Ditjen PPI						
	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Indeks	80	93,07	85,7	89,10	84,58
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	90	98,62	92,09	89,05	92,27
	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Ditjen PPI	Nilai	80	82,19	85,94	81,20	81,46
	Penilaian Kepuasan Ditjen PPI	Nilai	80	85	88,9	82,05	80,01

Sumber: Ditjen PPI (2024)

Sasaran Kegiatan 1

Menurunnya hambatan akses pasar di negara mitra

Indikator Kinerja Kegiatan 1:
Jumlah barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik di bilateral maupun regional (i.e. mendapatkan preferential tariff)

Untuk mengukur pencapaian sasaran Dengan semakin banyak jumlah barang yang Menurunnya hambatan akses pasar di negara mendapatkan preferential tariff dari perjanjian mitra, digunakan (1) indikator yang lebih konkret perdagangan internasional, maka akses pasar di yaitu Jumlah barang yang masuk di dalam negara mitra perjanjian akan semakin terbuka. perjanjian perdagangan Indonesia (i.e. Cara perhitungan indikator ini adalah sebagai mendapatkan preferential tariff) baik di bilateral maupun regional. berikut:

$$T_t = \sum T_{jt}$$

P_t = Jumlah barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik di bilateral maupun regional di tahun berjalan
 P_{jt} = Barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik di bilateral maupun regional di tahun berjalan

Tabel 5. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1

INDIKATOR : Jumlah barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia (i.e. mendapatkan preferential tariff) baik di bilateral maupun regional					
2022			2023		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
500	7.124	1.424,8	500	351	70

Sumber: Ditjen PPI (2024)

Sumber data yang digunakan dalam perhitungan adalah informasi dan dokumen barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik di bilateral maupun regional di tahun berjalan. Keuntungan dari kesepakatan dan perjanjian perdagangan internasional adalah penurunan hambatan perdagangan, baik bilateral, regional, dan multilateral. Hambatan perdagangan dapat berupa hambatan tarif dan hambatan non-tarif. Oleh sebab itu, dalam konteks penurunan hambatan tarif, capaian dari perundingan adalah semakin banyak barang yang mendapatkan penurunan tarif.

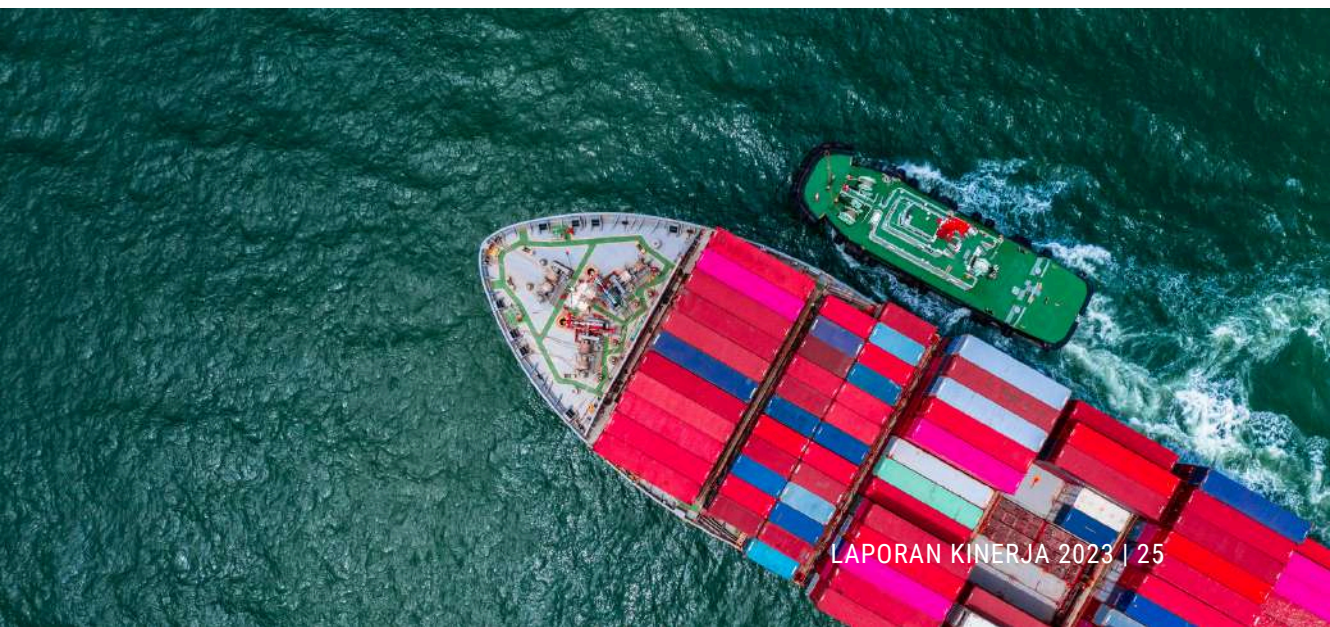
Target jumlah barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia (i.e. mendapatkan preferential tariff) baik di bilateral maupun regional pada tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 500 pos tarif. Perundingan perdagangan Indonesia, dilakukan dalam beberapa bentuk perjanjian yang dibedakan berdasarkan luas cakupannya, yaitu meliputi Preferential Trade Agreement (PTA), Free Trade Agreement (FTA), maupun Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Penetapan target 500 pos tarif tersebut didasarkan pada bentuk paling sederhana dari perjanjian perdagangan yaitu PTA yang memuat kesepakatan tentang komitmen tarif lebih rendah dari yang sebelumnya dikenakan.

Realisasi target pada tahun 2023 adalah sebesar 351 pos tarif. Jumlah pos tarif dari barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia tahun 2023 kurang dari yang ditargetkan. Hal ini karena pada tahun 2023 terdapat satu perjanjian perdagangan yang berhasil ditandatangani yaitu Indonesia-Iran PTA, di mana cakupan skema PTA tidak seluas pada skema CEPA yang dapat mengakomodir cakupan pos tarif yang lebih luas. Selain itu pada tahun 2023, Indonesia juga telah menyelesaikan satu perjanjian perdagangan yang telah conclude yaitu Protokol Perubahan Indonesia-Japan EPA.

Dalam rangka mendukung capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1, Setditjen PPI memiliki peran dalam memfasilitasi penyelenggaraan sidang di dalam negeri baik secara virtual melalui video conference maupun secara fisik dan juga partisipasi aktif pimpinan pada perundingan di luar negeri. Dengan dilaksanakannya perundingan di dalam negeri tim perunding Indonesia lebih mudah meyakinkan negara mitra untuk menerima atau menolak request atau offer agar sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Indonesia.

Sementara itu dalam rangka mengamankan dan memperluas akses pasar serta meningkatkan perundingan perdagangan internasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Ditjen PPI memfasilitasi partisipasi aktif pimpinan dalam menghadiri kegiatan sidang dan perundingan di luar negeri.

Oleh karena itu, Setditjen PPI menetapkan target penyelenggaraan sidang internasional di dalam negeri dan partisipasi aktif pimpinan di luar negeri setiap tahunnya. Sidang di dalam negeri dan partisipasi aktif pimpinan pada sidang di luar negeri yang telah dilakukan pada tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut:



Penyelenggaraan Sidang Perundingan Perdagangan Internasional Tahun 2023



29th ASEAN Economic Ministers' (AEM) Retreat Meeting (Magelang, 20-22 Maret 2023)

55th ASEAN Economic Ministers' (AEM) Meeting (Semarang, 19-20 Agustus 2023)



Pertemuan TNC-4 Indonesia-Bangladesh PTA tanggal 16-19 Mei 2023



3rd Meeting of Working Group on Sustainable Natural Rubber ANRPC tanggal 29-31 Agustus 2023



Penandatanganan Indonesia-Iran PTA tanggal 23 Mei 2023



Pertemuan Chief Negotiator IJEPA tanggal 27 - 31 Agustus 2023



Putaran ke-13 Indonesia - EU CEPA tanggal 6-11 Februari 2023



Pertemuan ke-2 reviu MoU on Skills Development Exchange Indonesia-Australia CEPA tanggal 29-31 Mei 2023



1st Joint Committee Meeting on Indonesia-Mozambique PTA tanggal 19 Oktober 2023



Putaran ke-4 Indonesia-Canada CEPA tanggal 20-24 Februari 2023



Putaran ke-5 Indonesia-Canada CEPA tanggal 29 Mei-2 Juni 2023



Putaran ke-6 Indonesia-Canada CEPA tanggal 23 - 27 Oktober 2023



Putaran ke-4 WG-NTMA Indonesia-Canada CEPA tanggal 31 Maret 2023



Pertemuan ke-18 komite bersama protokol perubahan IJEPA tanggal 6 Juli 2023



Pertemuan ke 59 International Coconut Community tanggal 5 - 7 Desember 2023



Putaran Pertama Indonesia-EAEU FTA tanggal 3-5 April 2023



Putaran ke-15 Indonesia-EU CEPA tanggal 11-14 Juli 2023



The 1st Joint Committee Meeting Indonesia - Korea CEPA tanggal 11 - 12 Desember 2023



Putaran ke-7 Indonesia-Iran PTA tanggal 13-14 Mei 2023



Peluncuran Indonesia-Peru CEPA tanggal 15 Agustus 2023



Perundingan Putaran ke-3 Indonesia-EAEU FTA tanggal 13 - 15 Desember 2023

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya implementasi dan pemahaman perundingan perdagangan internasional

Indikator Kinerja Kegiatan 2:

Meningkatnya implementasi dan pemahaman perundingan perdagangan internasional

Indikator Kinerja Kegiatan 2 disusun untuk mengukur fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional. Fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional adalah upaya untuk meningkatkan manfaat hasil perundingan perdagangan internasional. Sebuah perjanjian atau kerja sama yang telah disepakati dapat dirasakan manfaatnya jika setiap kesepakatan perjanjian tersebut telah disahkan.

Proses ratifikasi dalam perjanjian perdagangan internasional telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional.

Cara perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$FR = \sum FR_{jt}$$

FR_t = Jumlah fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional di tahun berjalan

FR_{jt} = Fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional di tahun berjalan

Tabel 6. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2

INDIKATOR : Fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional					
2022			2023		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
7	7	100	7	7	100

Sumber: Ditjen PPI (2024)

Sumber data yang digunakan dalam perhitungan adalah informasi dan dokumen fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional di tahun 2023. Proses pelimpahan dokumen yang ditargetkan di tahun 2023 dihitung dari bulan Oktober tahun sebelumnya sampai dengan bulan September di tahun berjalan.

Hal ini karena proses persiapan dokumen ratifikasi meliputi naskah translasi perjanjian, naskah akademik, analisis SWOT, dan sebagainya memerlukan waktu kurang lebih 3 bulan pelaksanaan. Target yang ditetapkan oleh Setditjen PPI terkait fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional pada tahun 2023 adalah sebesar 7 perjanjian.

Pada tahun 2023, Setditjen PPI telah memfasilitasi proses ratifikasi 7 (tujuh) perjanjian perdagangan internasional. Secara rinci, terdapat 2 (dua) Perjanjian Perdagangan Internasional telah mendapatkan pengesahan yaitu sebagai berikut:

ASEAN TRADE IN SERVICES AGREEMENT (ATISA)

Proses ratifikasi ATISA telah selesai dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengesahan ASEAN Trade in Services Agreement (Persetujuan Perdagangan Jasa ASEAN) tanggal 16 Januari 2023.



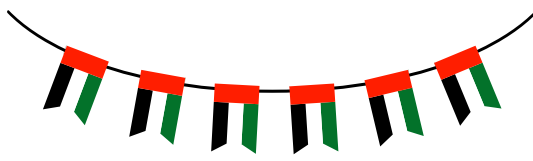
INDONESIA-UAE CEPA

Proses ratifikasi Indonesia-UAE CEPA telah selesai dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab, pada tanggal 12 Juli 2023.

Pemerintah Indonesia telah menyampaikan Pemberitahuan tertulis (notifikasi) kepada Pemerintah Persatuan Emirat Arab (PEA) pada tanggal 17 Juli 2023 melalui Nota Diplomatik Nomor D/01767/07/2023. Sesuai dengan Persetujuan, maka Indonesia-UAE CEPA telah resmi diimplementasikan pada tanggal 1 September 2023.

Dengan berlakunya IUAE CEPA per tanggal 1 September 2023, Pemerintah telah mengeluarkan 5 (lima) peraturan teknis pelaksanaan IUAE CEPA:

1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 87/2023 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka IUAE-CEPA;
2. PMK 88/2023 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan IUAE-CEPA;
3. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 28/2023 tentang Ketentuan Asal Barang dan Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia berdasarkan IUAE-CEPA;
4. Permendag 29/2023 tentang Kebijakan Penerapan Kuota Tingkat Tarif (Tariff Rate Quota) Untuk Impor Barang Tertentu dalam IUAE-CEPA; dan
5. Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) 22/2023 mengenai pedoman pelaksanaan pemanfaatan skema TRQ untuk produk bahan baku plastik tertentu dalam kerangka IUAE-CEPA.



Progres ratifikasi perjanjian perdagangan yang lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

INDONESIA-CHILE CEPA (TRADE IN SERVICE)

Penandatanganan Protocol to Amend the Comprehensive Economic Partnership Agreement of the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Chile for the Incorporation of Provisions on Trade in Services dilakukan pada tanggal 21 November 2022 oleh Menteri Perdagangan RI dan Wakil Menteri Hubungan Ekonomi Internasional Chile. Dokumen pra-ratifikasi telah disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR RI per tanggal 21 Maret 2023.

Pada Raker tanggal 4 September Komisi VI DPR RI dan Pemerintah RI melalui Kemendag, berhasil menyetujui bahwa pembahasan Protokol Perubahan IC-CEPA akan dilaksanakan melalui mekanisme Peraturan Presiden (Perpres).

Perjanjian perdagangan Jasa dalam kerangka IC-CEPA akan memperkuat dan memperdalam kerja sama ekonomi yang tengah berlangsung antara Indonesia dan Chile melalui peluang akses pasar jasa. Perdagangan Jasa antara kedua negara mencakup hubungan ekonomi yang lebih luas dan dapat mengarah pada peningkatan kesejahteraan ekonomi Indonesia dan Chile. Perjanjian perdagangan jasa di bawah IC-CEPA juga dapat berfungsi sebagai penggerak arus jasa yang lebih tinggi yang akan melengkapi implementasi kesepakatan IC-CEPA yang telah diimplementasikan pada tahun 2019. Dalam hal akses pasar jasa, penyedia jasa dalam negeri Indonesia juga akan memiliki peluang untuk dapat masuk ke pasar Chile lainnya untuk sektor jasa bisnis; jasa distribusi; jasa komunikasi; jasa konstruksi dan teknik terkait; jasa pendidikan; jasa lingkungan; jasa pariwisata dan perjalanan; jasa rekreasi, budaya dan olah raga; jasa transportasi, dan jasa lainnya. Langkah ini akan semakin mendukung ekspor Indonesia ke kawasan Amerika Latin.



INTERNATIONAL COFFEE AGREEMENT (ICA) 2022

Menteri Perdagangan didampingi oleh Ditjen PPI telah menandatangani International Coffee Agreement 2022 (ICA 2022) pada tanggal 8 Maret 2023 di kantor Sekretariat International Coffee Organization (ICO) di London, Inggris.

Perubahan dari ICA 2007 menjadi ICA 2022 dilatarbelakangi pandangan negara anggota ICO bahwa fungsi ICO tidak lagi relevan dengan situasi aktual sektor kopi global, sehingga diperlukan modernisasi dan penajaman fungsi ICO melalui ICA baru guna mendorong terbentuknya sektor kopi yang berkelanjutan, inklusif, dan berdayatahan, serta dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan rantai nilai sektor kopi, utamanya petani.

ICA merupakan perjanjian multilateral antara pemerintah yang mewakili negara-negara penghasil kopi dan konsumen kopi. Keterlibatan Indonesia dalam perundingan ICA 2022 berkontribusi pada industri kopi dunia secara menyeluruh. Indonesia berhasil memperjuangkan kepentingan sektor kopi nasional dengan menambahkan "premixed coffee" pada definisi kopi di ICA 2022. Hal ini secara tidak langsung menjadi pencapaian Indonesia dalam industri kopi dunia dan kehidupan para petani lokal. Pencapaian penting lainnya adalah penekanan pada keberlanjutan sektor kopi pada tiga pilar, yaitu ekonomi, sosial, serta lingkungan secara berimbang dan terintegrasi untuk keberlanjutan sektor kopi Indonesia dan juga dunia. Perjanjian ini mulai berlaku ketika dua pertiga dari negara anggota eksportir dan importir telah menandatangani instrumen ratifikasi.

Hingga September 2023, sebanyak 14 negara telah menandatangani dan 3 negara telah meratifikasi ICA 2022. Negara eksportir terdiri dari Brasil, El Salvador, Gabon, Indonesia, Kosta Rika, Kolombia, Meksiko, Mozambik, Nikaragua, Papua Nugini, Peru, Togo, Venezuela, Panama, dan Kolombia, sedangkan negara importir terdiri dari Jepang, Swiss, Inggris. Tanggal 31 Juli 2025 ditetapkan sebagai tenggat waktu bagi negara untuk melakukan ratifikasi.

Saat ini proses penerjemahan ICA 2022 telah rampung, yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan naskah penjelasan yang pada perkembangannya telah selesai dibahas pada tanggal 22 Desember 2023. Proses selanjutnya menunggu terbitnya Keputusan Presiden terkait program penyusunan (progsun) 2024, yang menyatakan bahwa ICA 2022 akan disahkan melalui Peraturan Presiden.



INDONESIA-IRAN PTA

Perjanjian perdagangan Indonesia-Iran PTA telah ditandatangani Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan dan Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran Hossein Amirabdollahian, pada tanggal 23 Mei 2023 di Istana Presiden, Bogor. Penandatanganan disaksikan langsung Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Iran Ebrahim Raisi.

Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Indonesia-Iran PTA, Kementerian Perdagangan telah mengirimkan surat Direktur Perundingan Bilateral Nomor PB.02/229/PPI.5/SD/05/2023 kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri perihal penyampaian Naskah Persetujuan Indonesia-Iran PTA agar dapat diberikan Certified true copy atas Indonesia-Iran PTA yang selanjutnya akan disampaikan kepada Kementerian Sekretariat Negara sebagai dokumen pendukung proses pra pengesahan Indonesia-Iran PTA.

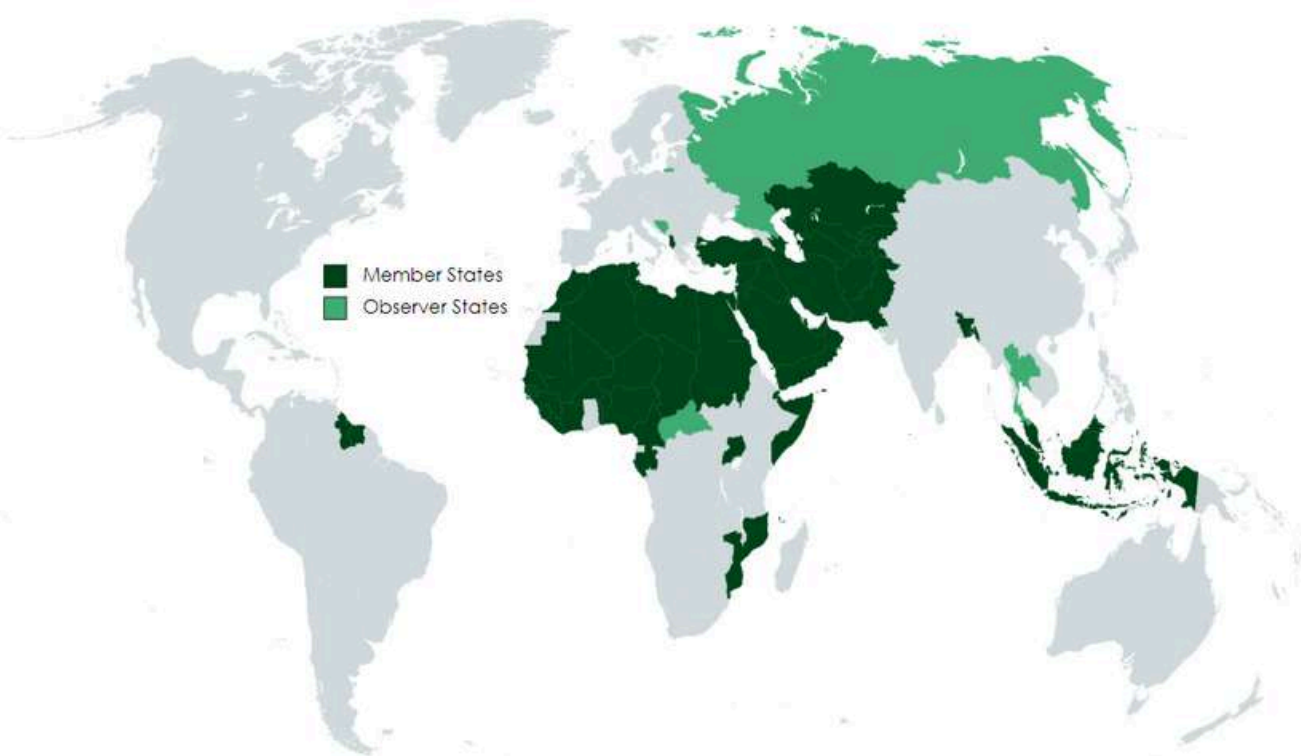
Menlu telah mengirimkan surat kepada Presiden RI No. 357/HI/08/2023/08/01 tanggal 9 Agustus 2023 perihal Permohonan Surat Presiden tentang Penyampaian Persetujuan Preferensi Perdagangan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Islam Iran.

Presiden RI telah mengirimkan surat kepada DPR Nomor R-47/Pres/09/2023 tanggal 23 September 2023 perihal Rencana Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran (Preferential Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the government of the Islamic Republic of Iran). Selanjutnya Kemendag bersama DPR Komisi VI akan melangsungkan rapat kerja dalam rangka pembahasan bentuk produk hukum pengesahan perjanjian perdagangan Indonesia – Iran PTA, yang jadwalnya menunggu kesiapan DPR.

INDONESIA-MALAYSIA BTA

Persetujuan Perdagangan Perbatasan / Border Trade Agreement (BTA) Indonesia-Malaysia telah ditandatangani oleh Menteri Perdagangan RI dan Menteri Investasi, Perdagangan dan Perindustrian Malaysia pada tanggal 8 Juni 2023 di Putrajaya. Berdasarkan Pasal 9-11 “Pengesahan Perjanjian Internasional” UU No. 24/2000 tentang Perjanjian Internasional dan Pasal 3, Ayat 2, Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan, Pengesahan BTA menggunakan Perpres.

Pemerintah Malaysia melalui nota diplomatik tanggal 20 Juli 2023 telah menyatakan prosedur internal Malaysia untuk berlakunya BTA telah tuntas. Sebagai tindak lanjut pengesahan, Kemendag telah mengompilasi dan Menyusun dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses pengesahan yaitu: 1) Salinan Naskah Resmi Persetujuan, 2) Terjemahan Naskah Persetujuan, 3) Konsep Rancangan Peraturan Presiden, dan 4) Naskah Penjelasan Pengesahan Persetujuan.



TRADE PREFERENTIAL SYSTEM AMONG THE MEMBER STATES OF THE OIC (TPS-OIC)

TPS-OIC merupakan perjanjian preferensi perdagangan yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antara negara anggota OKI yang terdiri atas 57 negara anggota. 18 negara telah meratifikasi seluruh dokumen TPS-OIC dan 14 negara yang telah meratifikasi dokumen dan menyerahkan concession list (as of November 2020). Dalam TPS-OIC terdapat tiga dokumen perjanjian yaitu:

- Framework Agreement, berlaku 2002, Indonesia meratifikasi pada 20 Mei 2011
- The Protocol on Preferential Tariff Scheme (PRETAS) berlaku 2010, Indonesia menandatangani pada 6 September 2011 (belum meratifikasi)
- The Rules of Origin (RoO) berlaku 2011, Indonesia menandatangani pada 6 September 2011 (belum meratifikasi).

Dalam rangka ratifikasi dokumen PRETAS dan ROO, Indonesia telah berkonsultasi dengan Sekretariat OIC melalui surat elektronik pada tanggal 5 September 2023 untuk mendapatkan



konfirmasi atas beberapa hal sebagai berikut:

- Pemanfaatan skema TPS-OIC dalam hubungan perdagangan intra-OKI sejak mulai implementasi tanggal 1 Juli 2022;
- Tarif yang digunakan sebagai basis (base rate) dalam penyusunan daftar konsesi penurunan tarif (concession list);
- Update daftar konsesi penurunan tarif (concession list) yang telah disampaikan oleh negara anggota kepada Sekretariat OKI.

Indikator Kinerja Kegiatan 3:
Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi hasil perundingan

Indikator Kinerja Kegiatan 3 merupakan indikator yang disusun untuk menggambarkan keberhasilan Setditjen PPI dalam mensosialisasikan hasil perundingan yang tercermin dari jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi hasil perundingan. Manfaat dari pelaksanaan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan perdagangan internasional tersebut, antara lain adalah:

- Para pemangku kepentingan dapat mengetahui hasil-hasil kesepakatan perdagangan internasional yang dilakukan Indonesia, sehingga mampu memanfaatkannya dalam upaya peningkatan ekspor; dan

- Merupakan sarana komunikasi dan konsultasi bagi para pemangku kepentingan dan Ditjen PPI. Hasil komunikasi tersebut dapat dijadikan sebagai masukan dalam menyusun posisi runding dan evaluasi kesepakatan-kesepakatan.

Semakin banyak pelaku usaha dan masyarakat yang mendapatkan, mengetahui, memahami dan mengikuti perkembangan informasi dan perkembangan terkini terkait perundingan perdagangan internasional maka akan semakin tinggi pula pemanfaatan hasil kesepakatan dan perjanjian perdagangan internasional. Cara perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$PS_t = \sum PS_{jt}$$

PS_t = Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi hasil perundingan di tahun berjalan
 PS_{jt} = Pelaku usaha yang mendapatkan informasi hasil perundingan di tahun berjalan

Tabel 7. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3

INDIKATOR : Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi hasil perundingan					
2022			2023		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1000	500	50	1000	2.150	215

Sumber: Ditjen PPI (2024)

Sumber data yang digunakan dalam perhitungan adalah data peserta sosialisasi FTA dari Bagian di Sekretariat Ditjen PPI yang melaksanakan penyebarluasan informasi perjanjian perdagangan internasional di tahun 2023.

Untuk dapat memberikan informasi hasil kesepakatan perjanjian, Sekretariat Ditjen PPI memiliki kegiatan sosialisasi di daerah yang melibatkan pelaku usaha, asosiasi, akademisi, Kementerian/Lembaga terkait dan pemerintah daerah.

KEGIATAN SOSIALISASI TAHUN 2023



Stakeholder

Pelaksanaan sosialisasi tahun 2023 melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di daerah, anggota Komisi VI DPR RI, akademisi, media dan pelaku usaha. Jumlah total peserta sosialisasi selama tahun 2023 adalah 2.150

Lokasi

Selama tahun 2023, sosialisasi dilaksanakan di 20 kota di Indonesia antara lain Garut, Tangerang, Nunukan, Ambon, Tarakan, Maluku Tengah, Yogyakarta dan lain-lain



Aktivitas

Bentuk kegiatan sosialisasi yang dilakukan antara lain sosialisasi secara langsung, talk show, dan on air di radio dan televisi di daerah.

Hasil-Hasil Perundingan

Hasil perundingan yang disosialisasikan antara lain RCEP, Indonesia-UAE CEPA, Indonesia-Malaysia BTA, Indonesia-Iran PTA, Hasil Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Ke-12, dan lain-lain.



HIGHLIGHT KEGIATAN SOSIALISASI TAHUN 2023



Sosialisasi hasil perundingan RCEP di Garut, tanggal 7 Februari 2023, dihadiri 140 pelaku usaha.

Sosialisasi hasil-hasil Perundingan Perdagangan Internasional RCEP, di Tangerang, tanggal 14 Maret 2023, dihadiri 120 pelaku usaha.



Sosialisasi hasil-hasil perundingan perdagangan lintas batas Indonesia-Malaysia BTA, di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, tanggal 9 April 2023 dihadiri 120 pelaku usaha.

Sosialisasi hasil-hasil perundingan perdagangan RCEP, di Provinsi Maluku, tanggal 17 Mei 2023, dihadiri 120 pelaku usaha.



Sosialisasi hasil-hasil perundingan perdagangan RCEP di Kota Ambon, tanggal 19 Mei 2023, dihadiri 100 pelaku usaha.



Sosialisasi hasil-hasil perundingan perdagangan internasional dengan tema "Isu Prioritas ASEAN Chairmanship" di Malang tanggal 22 Juni 2023, dihadiri 120 pelaku usaha

Sosialisasi hasil-hasil perundingan perdagangan RCEP di Piru Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 3 Juli 2023, dihadiri oleh 100 pelaku usaha



Sosialisasi hasil-hasil perundingan perdagangan internasional Indonesia-Malaysia BTA di kota Tarakan, tanggal 11 Juli 2023 dihadiri oleh 120 pelaku usaha.

Sosialisasi hasil-hasil perundingan perdagangan RCEP di Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 9 Agustus 2023, dihadiri oleh 100 pelaku usaha



Sosialisasi Hasil-Hasil Perundingan Perdagangan Internasional Indonesia-UAE CEPA di Kepulauan Tanimbar Maluku, tanggal 11 Oktober 2023, dihadiri 110 pelaku usaha

Indikator Kinerja Kegiatan 4: Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Center

Indikator Kinerja Kegiatan 4 adalah indikator yang disusun untuk mengetahui jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Center. Semakin banyak pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Center, artinya semakin banyak hasil kesepakatan dan perjanjian perdagangan yang dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Semakin optimal pemanfaatan hasil kesepakatan dan perjanjian perdagangan, maka peluang akan peningkatan ekspor dari pelaku usaha dalam negeri akan semakin terbuka lebar. Cara perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

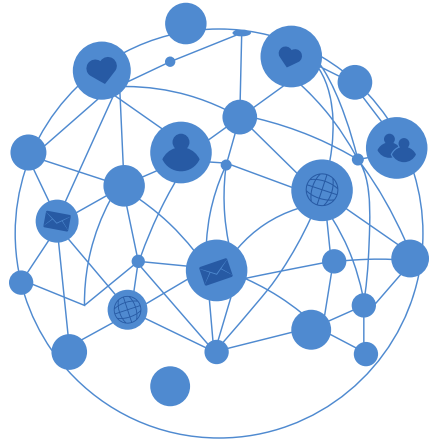
$$PF_t = \sum PF_{jt}$$

PF_t = Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Center di tahun berjalan

PF_{jt} = Pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Center di tahun berjalan

Sumber data yang digunakan dalam perhitungan adalah data jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Center di tahun 2023. FTA Center merupakan layanan publik yang terus dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Ditjen PPI) Kementerian Perdagangan di 3 (tiga) kota yaitu Jakarta, Bandung, dan Semarang.

Jumlah ini berbeda dari tahun 2022, di mana pada tahun 2023 FTA Center Makassar dijadikan sebagai pilor project dari FTA Center menjadi Export Center Makassar. Adanya transformasi tersebut diharapkan peranan Export Center tidak hanya sebatas pemanfaatan FTA, namun dapat memperkuat dan meningkatkan kegiatan ekspor terutama bagi pelaku ekspor UKM yang baru serta membantu penetrasi produk ekspor.



Export Center Makassar selanjutnya berada dibawah Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.

Pada tahun 2023, Ditjen PPI melalui FTA Center bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan daerah juga menyelenggarakan Coaching Clinic yang sempat tertunda karena pandemi Covid-19. Melalui Coaching Clinic tersebut harapannya pelaku usaha dapat menindaklanjuti dengan konsultasi secara berkelanjutan kepada FTA Center hingga mampu memanfaatkan FTA untuk menembus pasar ekspor di negara mitra FTA.

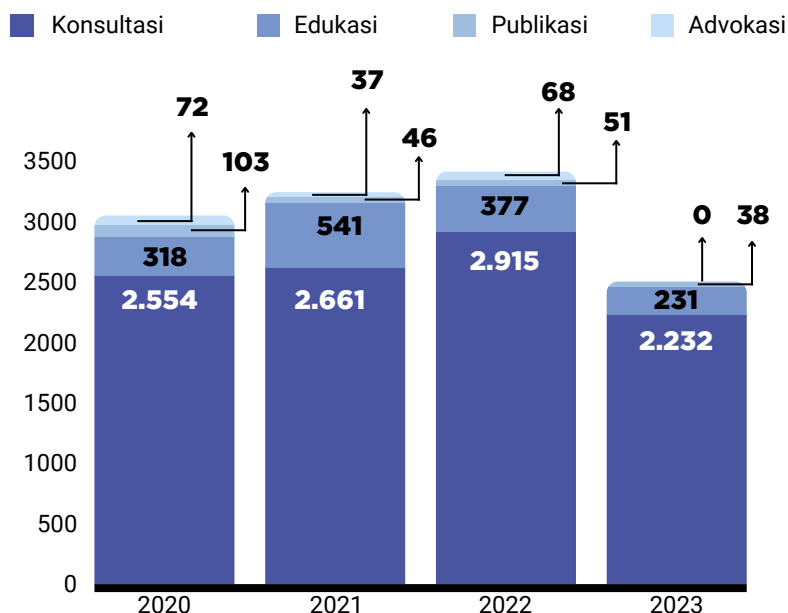
Sehingga capaian indikator ini didukung oleh 2 kegiatan yaitu pelayanan FTA Center di 3 kota, dan Coaching Clinic di berbagai daerah. Realisasi dan capaian pada indikator kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Kegiatan yang dilaksanakan oleh FTA Center antara lain:

- Layanan Konsultasi: Memberikan pertimbangan dan bimbingan kepada pelaku usaha khususnya UKM yang berpotensi ekspor agar dapat melakukan ekspor terutama ke negara mitra FTA;
- Layanan Sosialisasi/Edukasi: Melakukan upaya memasyarakatkan skema perdagangan yang terdapat dalam perjanjian perdagangan bebas;
- Layanan Advokasi: Memberikan bantuan kepada pelaku usaha terkait permasalahan atau hambatan yang mereka hadapi dalam memanfaatkan perjanjian perdagangan internasional/FTA.

Sementara itu, media publikasi (booklets/factsheets, newsletter, bulletins, medsos, website, dsb) berisi konten yang memberikan informasi yang akurat dan konsisten untuk membantu stakeholder dan masyarakat memahami dan menerima kebijakan perdagangan bebas, sebagai contoh, pentingnya membuka pasar untuk ekspor dan impor dengan tujuan meningkatkan daya saing.

Layanan FTA Center terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Layanan FTA Center dari tahun 2020-2023 ditunjukkan grafik berikut:



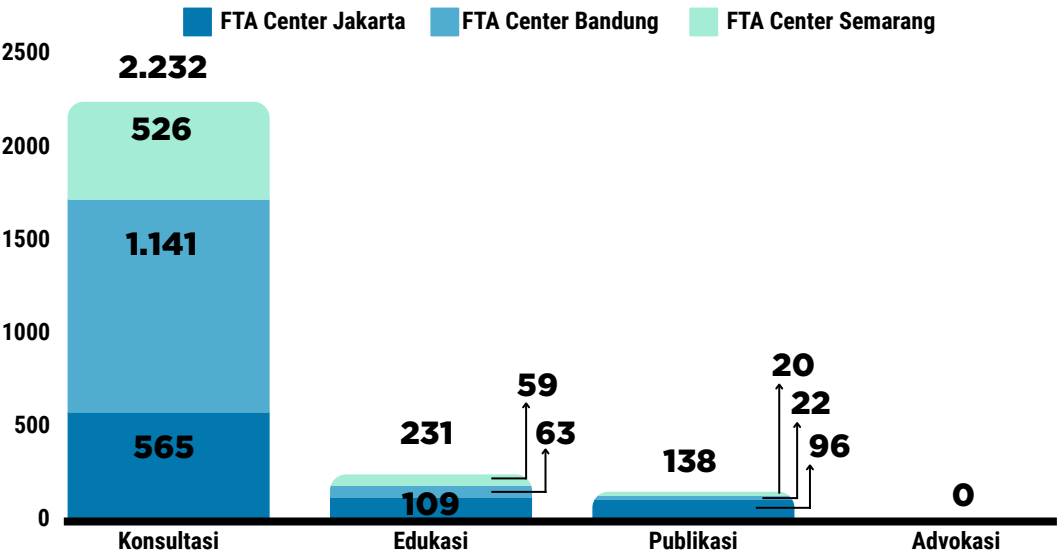
Sumber: Ditjen PPI (2024)

Gambar 2. Layanan FTA Center Tahun 2020 - 2023

Pada tahun 2023, FTA Center Bandung memiliki jumlah layanan terbanyak yaitu sebesar 1.226 layanan dengan topik yang paling banyak diulas adalah Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI). FTA Center Jakarta menempati urutan kedua dalam jumlah pelayanan yaitu 770 layanan dan topik yang banyak diulas adalah tentang Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI). Pada urutan ketiga yang memberikan pelayanan terbanyak adalah FTA Center Semarang sebanyak 605 layanan dengan topik yang banyak diulas adalah akses pembiayaan dan tata cara ekspor.

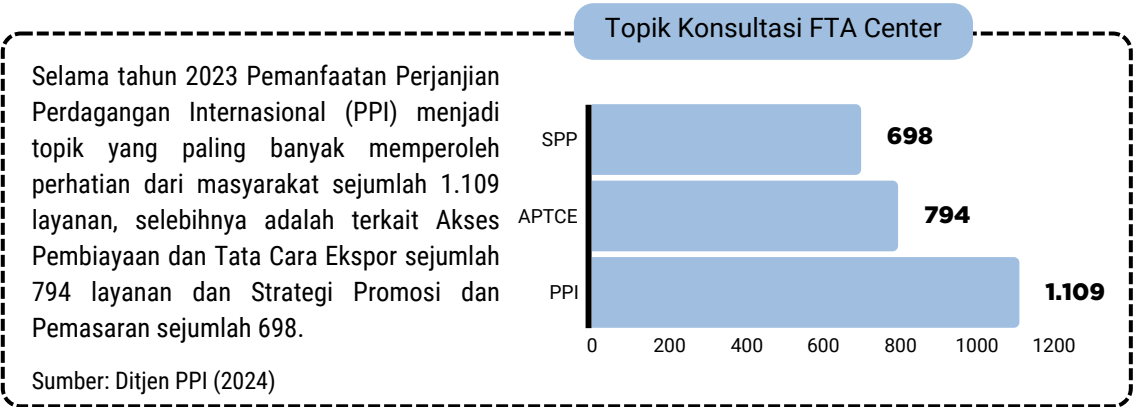
Selama tahun 2023, FTA Center di tiga kota memberikan layanan konsultasi sebanyak 2.232 layanan, edukasi sebanyak 231 layanan, dan publikasi sebanyak 138 layanan.

Sementara itu selama tahun 2023 tidak ada penanganan terkait dengan hambatan perdagangan di negara mitra. Penanganan hambatan yang ditangani adalah hambatan perdagangan di dalam negeri sehingga tidak diperhitungkan sebagai capaian layanan advokasi.



Sumber: Ditjen PPI (2023)

Gambar 3. Total Layanan FTA Center Tahun 2023 di Jakarta, Bandung, dan Semarang

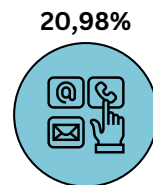
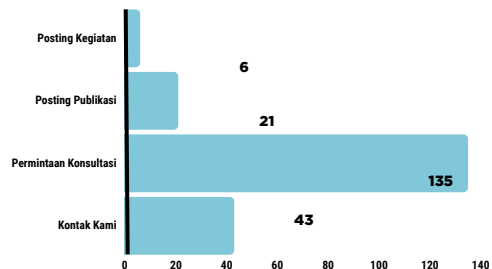
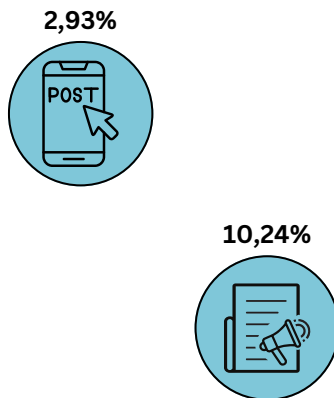


Website FTA Center

Selama tahun 2023, pelayanan FTA yang dilakukan melalui website sebagaimana ditunjukkan gambar di samping, sejumlah 205 layanan yang terdiri dari posting kegiatan (2,93%), posting publikasi (10,24%), permintaan konsultasi (65,85%) dan kontak kami (20,98%).



<https://ftacenter.kemendag.go.id/>



Sumber: Ditjen PPI (2024)

FTA Center juga aktif menginisiasi pelaksanaan berbagai Webinar dengan mengundang unit-unit eselon II di lingkungan Ditjen PPI, Perwakilan Perdagangan di luar negeri terutama negara mitra yang telah memiliki perjanjian perdagangan dengan Indonesia, serta Kementerian/Lembaga dan asosiasi terkait untuk mendiskusikan dan menginformasikan kepada masyarakat tentang optimalisasi pemanfaatan hasil perjanjian perdagangan internasional dan isu-isu terkait ekspor lainnya. Beberapa FTA Center bahkan juga melengkapi informasinya dengan format video yang diunggah di channel Youtube yang membuat para pelaku usaha menjadi lebih mudah dalam mengaksesnya.

Dengan mengetahui informasi FTA, maka para pelaku usaha mempunyai banyak pilihan untuk diversifikasi produk atau diversifikasi pasar.

Pelaku usaha dapat meningkatkan ekspor ke negara-negara mitra FTA dikarenakan produk Indonesia menjadi lebih kompetitif dari segi harga dan dapat bersaing dengan produk negara lain. Lebih lanjut, dengan adanya FTA, eksportir Indonesia yang semula tidak melakukan ekspor ke negara mitra FTA juga dapat melihat peluang pasar baru.

Di sisi lain, FTA juga dapat dimanfaatkan oleh importir Indonesia untuk mengimpor bahan baku dengan harga yang lebih murah untuk kemudian bahan baku tersebut diolah dan diekspor ke negara lain. FTA juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas eksportir Indonesia untuk memenuhi standar negara mitra FTA dikarenakan FTA juga mencakup kerja sama ekonomi seperti capacity building atau technical assistance.

Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya efisiensi dan efektifitas kelembagaan Ditjen PPI

Indikator Kinerja Kegiatan 5: Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Indikator yang merepresentasikan kinerja reformasi birokrasi adalah indeks reformasi birokrasi yang dinilai dari beberapa kategori penilaian dan hasilnya diberikan dalam bentuk angka. Keberhasilan Reformasi Birokrasi pada suatu instansi pemerintah diukur melalui suatu indeks yang disebut dengan Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB), yang bersumber dari hasil penilaian final Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB Kemendag untuk Unit Kerja Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional.

Indeks ini didapat dari proses evaluasi Reformasi Birokrasi, yang bertujuan untuk memetakan kemajuan proses RB serta memberikan saran perbaikan ke depan terhadap instansi tersebut. Hasil perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi adalah berupa nilai. Penilaian ini diperoleh berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan dalam Evaluasi Wilayah Tertib Administrasi (WTA).

Pada tahun 2023, nilai Indeks Reformasi Ditjen PPI adalah sebesar 84,58. Angka ini lebih tinggi dari nilai yang ditargetkan yaitu sebesar 80. Sehingga capaian yang diperoleh Ditjen PPI untuk IK-5 adalah sebesar 111%. Capaian ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu sebesar 116,34%.

Tabel 9. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 5

INDIKATOR : Indeks Reformasi Birokrasi					
2022			2023		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
80	89,10	111	80	84,58	105,7

Sumber: Ditjen PPI (2024)

Enam Area Perubahan Reformasi Birokrasi Tahun 2023



01 - Manajemen Perubahan

Bobot	Skor
5%	5,00

Bobot	Skor
12%	10,50

02 - Deregulasi Kebijakan

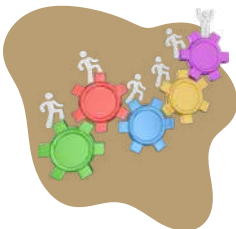


03 - Penataan dan Penguatan Organisasi

Bobot	Skor
5%	5,00

Bobot	Skor
24%	22,02

04 - Penataan Tatalaksana



05 - Penataan Sistem Manajemen SDM

Bobot	Skor
29%	24,36

Bobot	Skor
25%	17,7

06 - Peningkatan Kualitas Pelayanan



Sumber: Itjen, Kemendag (2024)

Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan menghasilkan perbaikan budaya kerja yang mendorong penciptaan inovasi dan kreativitas kerja sehingga berdampak pada peningkatan kinerja organisasi Ditjen PPI

a. Perbaikan Budaya Kerja

Nilai budaya kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan yang diadopsi oleh Ditjen PPI, yaitu

- 1 Profesional**
Meningkatnya profesionalisme pegawai di lingkungan Ditjen PPI dapat dilihat dari SKP bulanan sudah sesuai dengan SKP tahunan yang diperjanjikan.
- 2 Melayani**
Untuk mengetahui feedback dari kepuasan masyarakat, Ditjen PPI secara konsisten setiap tahun melakukan monitoring dan evaluasi atas survey melalui penyebaran kuesioner.
- 3 Integritas**
Meningkatnya integritas pegawai di lingkungan Ditjen PPI yang dapat dilihat dari menurunnya tingkat pelanggaran disiplin di lingkungan Ditjen PPI.
- 4 Inovasi**
Penggunaan Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di lingkungan Ditjen PPI dalam melakukan komunikasi tertulis meningkat, sehingga proses kerja lebih baik dan cepat.
- 5 Sinergi**
Pelimpahan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan Ditjen PPI melalui FTA Center.



DEREGULASI KEBIJAKAN

Penyederhanaan Prosedur

Deregulasi Kebijakan menghasilkan penyederhanaan prosedur yang menyebabkan proses layanan menjadi lebih cepat dan lebih baik sehingga memberikan kontribusi positif bagi perekonomian.

Kemudahan dan Efisiensi

Hasil revisi kebijakan perdagangan terhadap perjanjian perdagangan internasional menghasilkan kemudahan dan efisiensi pada pelayanan informasi tentang perundingan perdagangan internasional melalui website Ditjen PPI.

Peningkatan Daya Saing Produk

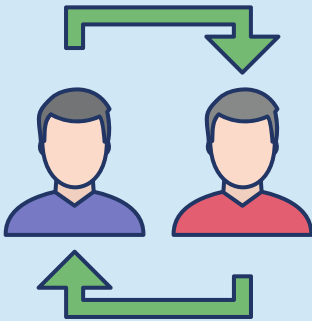
Implementasi perjanjian perdagangan internasional tersebut memberikan dampak positif yang sangat signifikan terhadap peningkatan daya saing produk Indonesia di negara-negara mitra yang telah memiliki perjanjian yaitu dalam bentuk penurunan tarif bea masuk yang lebih rendah (tarif preferensi) dibanding negara pesaing yang tidak memiliki perjanjian perdagangan internasional.

Produk Hukum

Hasil Perundingan Perdagangan Internasional Entry Into Force (EIF) Yang Sudah Melalui Tahap Ratifikasi Akan Menghasilkan Perpres Dan UU.

Penataan dan Penguatan Organisasi

Ditjen PPI telah melakukan penataan dan penguatan organisasi antara lain:

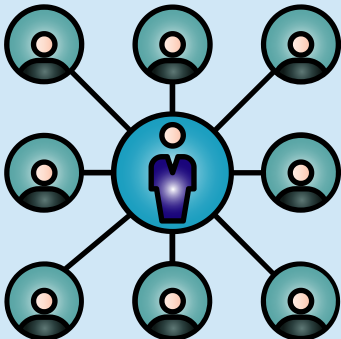


01

Penyederhanaan birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan dengan cara mengalihkan Pejabat Struktural menjadi Pejabat Fungsional.

**Pembentukan Jabatan Fungsional
Negosiator Perdagangan di lingkungan
Kementerian Perdagangan**

02



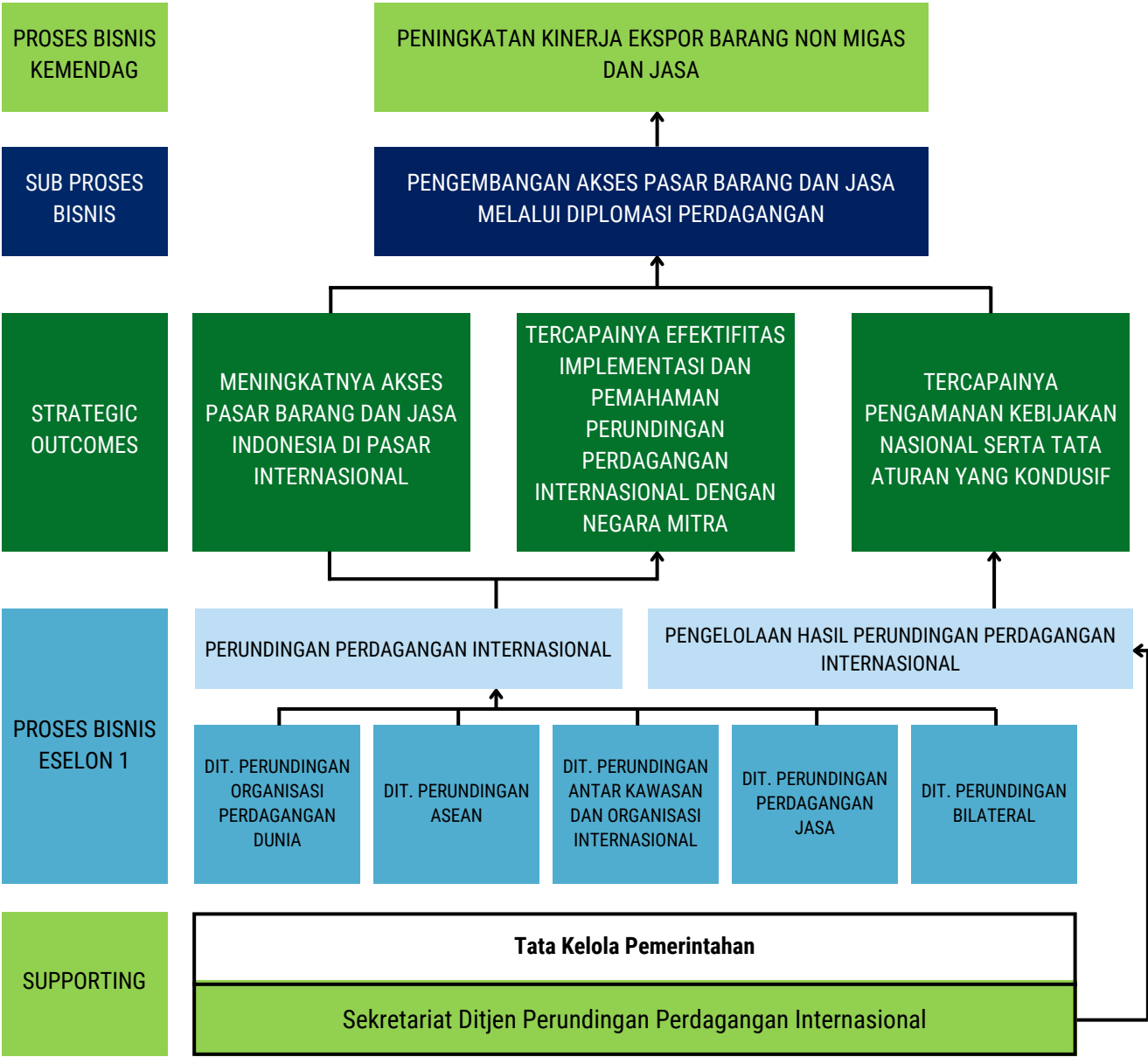
03

Melakukan pemetaan jabatan dan pejabat struktural yang dapat disederhanakan dan dialihkan jabatan struktural sesuai peta jabatan

Penataan Tata Laksana

Ditjen PPI telah memiliki peta proses bisnis yang dijabarkan ke dalam SOP baik makro maupun mikro dan SOP-SOP tersebut telah diterapkan di lingkungan Ditjen PPI

Peta Proses Bisnis di Lingkungan Ditjen PPI



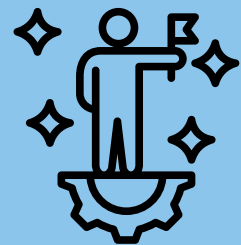
Gambar 4. Peta Proses Bisnis di Lingkungan Ditjen PPI

Penataan Sistem Manajemen SDM



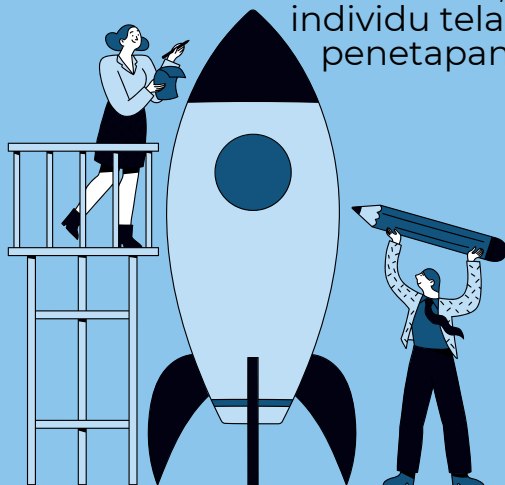
Ditjen PPI telah melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai.

Seluruh perhitungan pegawai Ditjen PPI telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan unit kerja berdasarkan analisis jabatan fungsional dan analisis beban kerja



Ditjen PPI sebagai unit Pembina Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan (JFNP) telah Menyusun standar kompetensi jabatan (SKJ) bagi JFNP pertama, muda dan madya

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu, di mana hasil penilaian individu telah dijadikan dasar untuk penetapan penghargaan pegawai berakhlak



PENGUATAN AKUNTABILITAS

Kegiatan dan output dalam Rencana Kerja Anggaran secara langsung mendukung pencapaian sasaran program Ditjen PPI. Pimpinan Ditjen PPI terlibat aktif secara langsung dan terus menerus dalam setiap tahapan penyusunan perencanaan kinerja, mulai dari penyusunan dokumen Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2023, penetapan Indikator Kinerja Utama, dan selanjutnya turut mengkomunikasikan rencana kinerja tersebut kepada seluruh pegawai di lingkungan Ditjen PPI dalam rangka membangun manajemen kinerja unit. Penetapan indikator kinerja juga telah disusun secara wajar dan memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha guna mendukung peningkatan nilai ekspor Indonesia. Indikator tersebut adalah:



Persentase nilai ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik bilateral maupun regional.



Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra PTA/FTA/CEPA Indonesia



Kesepakatan perundingan perdagangan jasa di forum internasional



Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk pasar Indonesia di negara mitra.



Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional.



Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani.



Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA



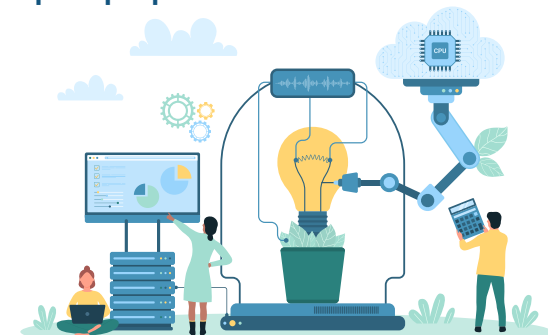
PENGUATAN PENGAWASAN

Ditjen PPI telah melakukan pelaporan berkala rekapitulasi penerimaan gratifikasi pegawai ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dimana selama periode bulan Januari s.d. November 2023 dan tidak terdapat laporan penerimaan gratifikasi di lingkungan Ditjen PPI, baik yang berhubungan dengan jabatan maupun yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

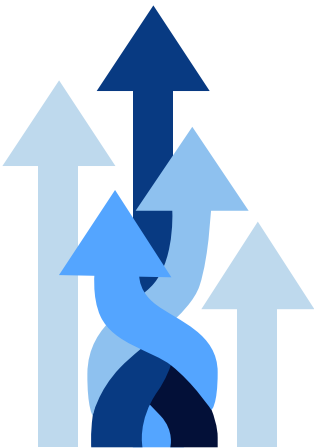
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana tindak pengendalian risiko yang ditetapkan pada dokumen profil risiko organisasi. Kinerja penerapan manajemen risiko juga telah digunakan sebagai indikator penilaian kinerja pada unit kerja namun baru pada tingkatan operasional/kegiatan.

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

Telah terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial). Ditjen PPI telah menetapkan standar kebijakan pelayanan dan telah dimaklumkan. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Ditjen PPI dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara online (website, media sosial, dll) dan offline. Pengaduan masyarakat terkait pelayanan telah didokumentasikan dan dilaporkan secara berkala kepada pimpinan.



Indikator Kinerja Kegiatan 6:
Indikator Kinerja Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA)



Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran atau IKPA. Di dalam IKPA terdapat 3 (tiga) aspek pengukuran dan 8 (delapan) indikator kinerja, yaitu:

- Aspek kualitas perencanaan anggaran, terdiri dari indikator: Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA.

- Aspek kualitas pelaksanaan anggaran, terdiri dari indikator: Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM.
- Aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran, terdiri dari indikator: capaian output.

Penilaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran atau IKPA ini dituangkan dalam Aplikasi Online Monitoring SPAN atau OMSPAN. Hasil penilaian IKPA Ditjen PPI pada tahun 2023 sebesar 92,27 yang didasarkan pada perhitungan terhadap delapan indikator sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 10. Indikator Pelaksanaan Anggaran Ditjen PPI Tahun 2023

Aspek Penilaian	Indikator Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	100,00	10	10,00	83,42
	Deviasi Halaman III DIPA	66,84	10	6,68	
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	93,63	20	18,09	92,45
	Belanja Kontraktual	89,78	10	9,26	
	Penyelesaian Tagihan	87,04	10	7,14	
	Pengelolaan UP dan TUP	91,80	10	7,21	
	Dispensasi SPM	100,00	5	5,00	
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	100,00	25	25,00	100,00
Nilai total		92,27			
Konversi Bobot		100%			
Nilai Akhir		92,27			

Sumber: OMPSAN (2024)

Tabel 11. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 6

INDIKATOR : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)					
2022			2023		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
90	89,05	98,94	90	92,27	102,5

Sumber: Ditjen PPI (2024)

Dari hasil perhitungan nilai IKPA Ditjen PPI, diketahui masih terdapat indikator pelaksanaan anggaran yang belum optimal antara lain deviasi halaman III DIPA sehingga perlu ditingkatkan capaiannya. Namun demikian, indikator-indikator lainnya tentu harus tetap diperhatikan karena tiap-tiap indikator juga dapat mempengaruhi capaian nilai dari indikator lainnya.

Target yang ditetapkan pada tahun 2023 untuk nilai IKPA sebesar 90. Sehingga target tersebut tercapai dengan realisasi sebesar 92,27 dan capaian 102,5%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, terjadi peningkatan sebesar 3,6 persen, di mana realisasi pada tahun 2022 adalah sebesar 89,05 dengan target 90 sehingga capaiannya capaian 98,94%, sebagaimana ditunjukkan tabel di atas.



Indikator Kinerja Kegiatan 7:
Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Ditjen PPI

Tabel 12. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 7

Indikator Kinerja : Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Ditjen PPI					
2022			2023		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
80	81,20	101,50	80	81,46	102

Sumber: Ditjen PPI (2024)

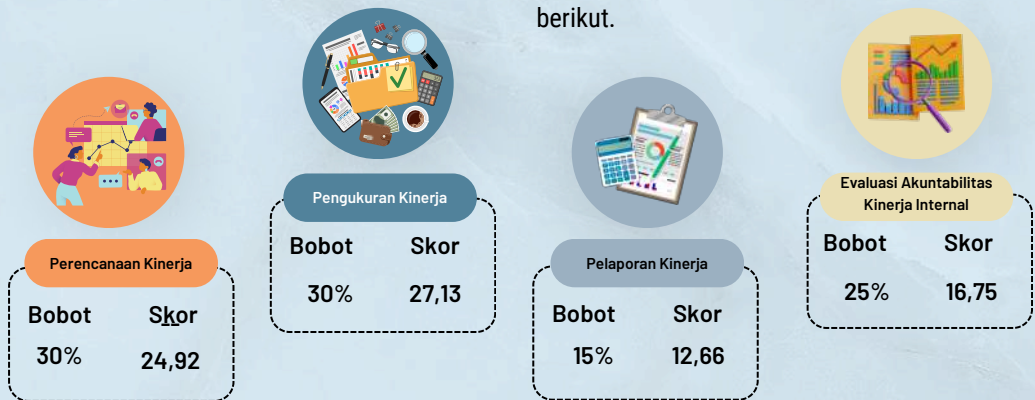
Indikator ketujuh (IK-7) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Indikator Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja merupakan indikator yang bertujuan untuk mengukur dan menilai implementasi SAKIP pada Ditjen PPI dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil.

Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan tim Inspektorat Jenderal, skor implementasi SAKIP Ditjen PPI adalah 81,46 dengan predikat A (Memuaskan). Hal ini menunjukkan bahwa secara umum implementasi SAKIP pada Ditjen PPI sangat baik, akuntabel, berkinerja baik dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal sehingga dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level bawah (pegawai).

Pada tahun 2023, Ditjen PPI mampu merealisasikan IK-7 dengan realisasi sebesar 81,46. Angka ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 80, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 102%. Dengan capaian yang melebihi target tersebut menunjukkan bahwa implementasi AKIP di lingkungan Ditjen PPI sangat baik, akuntabel, berkinerja baik dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2022, Ditjen PPI menargetkan penilaian AKIP sebesar 80 dengan realisasi sebesar 81,20, sehingga terjadi peningkatan nilai SAKIP sebesar 11%.

Hasil skoring atas tiap aspek implementasi SAKIP Ditjen PPI menunjukkan bahwa skor paling kecil dan berkontribusi terhadap penurunan nilai AKIP Ditjen PPI tahun 2023 adalah aspek Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Ada pun skor hasil tiap aspek implementasi SAKIP Ditjen PPI adalah sebagai berikut.



Indikator Kinerja Kegiatan 8:
Penilaian Kepuasan Stakeholder Ditjen PPI

Indikator kinerja kedelapan (IK-8) merupakan indikator yang disusun untuk menilai kepuasan stakeholder Ditjen PPI. Sumber data yang digunakan dalam perhitungan adalah melalui survei kepuasan terhadap stakeholder Ditjen PPI yang dilakukan oleh Setditjen PPI. Cara perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$S = \frac{\sum P}{Q}$$

- S = Rata-rata kepuasan Stakeholder terhadap dukungan Ditjen PPI terhadap perundingan perdagangan internasional
- P = Penjumlahan nilai dari seluruh responden
- Q = Jumlah responden

Pada tahun 2023 Ditjen PPI mendapatkan nilai 80,01 atas penilaian kepuasan stakeholder Ditjen PPI, yang menunjukkan bahwa stakeholder Sekretariat Ditjen PPI mendapatkan manfaat dari layanan yang diberikan. Nilai ini lebih dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 80 dengan capaian 100%.



Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian tahun 2023 lebih rendah di mana realisasi tahun 2022 adalah sebesar 82,5 dengan capaian 103%. Meskipun demikian secara umum 100% menunjukkan bahwa stakeholder merasa puas atas pelayanan yang dilakukan oleh Setditjen PPI. Tabel perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya ditunjukkan tabel berikut:

Tabel 13. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 8

Indikator Kinerja : Penilaian Kepuasan Stakeholder Ditjen PPI					
2022			2023		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
80	82,5	103	80	80,01	100

Sumber: Ditjen PPI (2024)



B. KINERJA ANGGARAN

Pada tahun 2023, Ditjen PPI mengalokasikan anggaran untuk Sekretariat Ditjen PPI sebesar Rp141.092.401.000,- yang kemudian direvisi menjadi Rp139.939.952.000,-. Realisasi yang telah dilakukan sampai dengan akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp137.852.912.884,- atau dengan capaian sebesar 98,51 persen, sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 14. Alokasi Anggaran Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2023

Kegiatan	Anggaran (DIPA Awal)	Revisi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	84.768.839.000	86.766.390.000	85.976.090.722	99,09
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional	56.323.562.000	53.173.562.000	51.876.822.162	97,56
	141.092.401.000	139.939.952.000	137.852.912.884	98,51

Sumber: SAKTI, diolah (2024)

Sementara itu perbandingan realisasi penyerapan anggaran Setditjen PPI sampai dengan akhir 31 Desember tahun 2022 dan 2023 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan capaian sebesar 0,13 poin dibandingkan capaian tahun 2022. Pada tahun 2022 Setditjen PPI mengalokasikan anggaran sebesar Rp91.246.964.000 dengan realisasi sebesar Rp89.769.622.581 dan capaian 98,38%. Tabel perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dan tahun 2023 serta tabel realisasi anggaran tahun 2023 berdasarkan sasaran ditunjukkan tabel berikut:

Tabel 15. Perbandingan Realisasi Anggaran Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2022 dan 2023

2022			2023		
Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
91.246.964.000	89.769.622.581	98,38	139.939.952.000	137.852.912.884	98,51

Sumber: Ditjen PPI (2024)

Tabel 16. Realisasi Anggaran Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2023 Berdasarkan Sasaran

Sasaran	Output	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Menurunnya hambatan akses pasar di negara mitra	Penurunan Hambatan Akses Pasar Di Negara Mitra	22.617.279.000	22.435.290.825	99,20
	Penguatan Peran Diplomasi Perundingan Perdagangan Internasional	47.542.385.000	47.365.774.964	99,63
	Peningkatan Kapasitas Negosiator Perundingan Perdagangan Internasional di Pusat, LN, dan Daerah	742.569.000	663.359.614	89,33
Meningkatnya implementasi dan pemahaman perundingan perdagangan internasional	Dokumen Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional	2.856.067.000	2.729.443.954	95,57
	Pemahaman dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	4.333.932.000	4.307.926.351	99,40
	FTA Center	8.674.158.000	8.474.295.014	97,70
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kelembagaan Ditjen PPI	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	707.788.000	565.742.127	79,93
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	285.818.000	242.514.172	84,85
	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Ditjen PPI	1.280.996.000	1.114.032.860	86,97
	Penilaian Kepuasan Stakeholder Ditjen PPI	50.898.960.000	49.954.533.003	98,14
		139.939.952.000	137.852.912.884	98,51

Sumber: SAKTI, diolah (2024)

4

Penutup

Sekretariat Ditjen PPI memiliki capaian kinerja yang baik pada tahun 2023 7 (tujuh) dari 8 (delapan) indikator kinerja kegiatan yang menunjukkan tercapainya sasaran kegiatan Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2023 tercapai dan bahkan melampaui target.



Kesimpulan

Sekretariat Ditjen PPI memiliki capaian kinerja yang baik pada tahun 2023 7 (tujuh) dari 8 (delapan) indikator kinerja kegiatan yang menunjukkan tercapainya sasaran kegiatan Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2023 tercapai dan bahkan melampaui target. Terdapat 1 indikator yang tidak tercapai targetnya, yaitu indikator “Jumlah barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia (i.e mendapatkan preferential tariff) baik di bilateral maupun regional” pada sasaran kinerja “Menurunnya hambatan akses pasar di negara mitra”. Jumlah pos tarif dari barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia tahun 2023 kurang dari yang ditargetkan. Hal ini karena pada tahun 2023 terdapat satu perjanjian perdagangan yang berhasil ditandatangani yaitu Indonesia-Iran PTA, di mana cakupan skema PTA tidak seluas pada skema CEPA yang dapat mengakomodir cakupan pos tarif yang lebih luas. Realisasi tersebut juga didukung oleh satu perjanjian perdagangan yang telah conclude yaitu Protokol Perubahan Indonesia-Japan EPA.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian rata-rata Sekretariat Ditjen PPI pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja PPI pada tahun 2022, yaitu dari 264,7 persen menjadi 117,63 persen.

Di tengah tantangan proses percepatan penyelesaian perundingan, pada tahun 2023 Ditjen PPI berfokus pada penyelesaian ratifikasi perjanjian perdagangan internasional, penyebarluasan informasi hasil-hasil perundingan, serta fasilitasi FTA Center sehingga mendorong pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2023 Sekretariat Ditjen PPI mengalokasikan anggaran sebesar Rp141.092.401.000,- yang kemudian direvisi menjadi Rp139.939.952.000,-. Realisasi yang telah dilakukan sampai dengan akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp137.852.912.884,- atau dengan capaian sebesar 98,51 persen.

Rekomendasi

Beberapa rekomendasi agar dapat meningkatkan kinerja Sekretariat Ditjen PPI ke depannya antara lain:

1. Untuk meningkatkan peran dan pemanfaatan perundingan perdagangan internasional, Sekretariat Ditjen PPI perlu meningkatkan koordinasi internal Ditjen PPI dalam rangka membangun sinergitas dan kesamaan arah gerak unit-unit di lingkungan Ditjen PPI, serta koordinasi eksternal dalam rangka penguatan dukungan eksternal terhadap perundingan perdagangan internasional.
2. Untuk meningkatkan kualitas perundingan dan pemanfaatan hasil perundingan serta menghadapi isu perundingan yang semakin dinamis, Sekretariat Ditjen PPI secara berkelanjutan terus melakukan kerja sama dengan akademisi dan stakeholder lain melakukan kajian yang mendalam dalam rangka peninjauan perundingan perjanjian perdagangan internasional.
3. Untuk meningkatkan kualitas perundingan dan pemanfaatan hasil perundingan, Sekretariat Ditjen PPI secara berkelanjutan perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di lingkungan Ditjen PPI. Kemampuan dalam bernegosiasi dan kemampuan dalam menguasai isu-isu yang dirundingkan serta kemampuan dalam berbahasa asing menjadi standar kompetensi yang perlu dimiliki oleh setiap pegawai di lingkungan Ditjen PPI dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi.
4. Untuk mendorong pemanfaatan hasil-hasil perundingan perdagangan internasional melalui kegiatan sosialisasi, Sekretariat Ditjen PPI perlu melakukan pemetaan mitra potensial dan strategis. Selain itu, perlu dilakukan perluasan sarana untuk penyebaran informasi PTA/FTA/CEPA dan fasilitasi pemanfaatannya (edukasi, konsultasi, advokasi) yg lebih luas dan merata termasuk peningkatan kualitas layanan web FTA Center <https://ftacenter.kemendag.go.id/>.
5. Untuk memperbesar dampak dan manfaat dari perundingan perdagangan internasional, Sekretariat Ditjen PPI perlu memperkuat kelembagaan FTA Center yang menjadi pusat dukungan terhadap para pelaku usaha, eksportir, dan masyarakat dalam memanfaatkan berbagai kesepakatan kerja sama dan perjanjian perdagangan internasional yang telah diimplementasikan. Posisi strategis FTA Center yang bisa menjadi hub antara Kemendag, K/L terkait, pemerintah daerah, universitas, dan berbagai asosiasi dalam menyediakan fasilitasi pemanfaatan hasil-hasil perundingan perdagangan internasional.



LAMPIRAN

Lampiran 1

Formulir Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Tahun 2020-2024

Kegiatan Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Cara Perhitungan	Sumber Data
1	Menurunnya hambatan akses pasar di negara mitra	Jumlah barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik di bilateral maupun regional. (i.e. mendapatkan preferential tariff)	$T_t = \sum T_{jt}$ <p> P_t = Jumlah barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik di bilateral maupun regional di tahun berjalan P_{jt} = Barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik di bilateral maupun regional di tahun berjalan </p>	Informasi dan dokumen barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik di bilateral maupun regional di tahun berjalan
2	Meningkatnya implementasi dan pemahaman perundingan perdagangan internasional	Fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional	$FR = \sum FR_{jt}$ <p> FR_t = Jumlah fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional di tahun berjalan FR_{jt} = Fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional di tahun berjalan </p>	Informasi dan dokumen fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional di tahun berjalan
3		Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi hasil perundingan	$PS_t = \sum PS_{jt}$ <p> PS_t = Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi hasil perundingan di tahun berjalan PS_{jt} = Pelaku usaha yang mendapatkan informasi hasil perundingan di tahun berjalan </p>	Informasi dan dokumen pelaku usaha yang mendapatkan informasi hasil perundingan di tahun berjalan
4		Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Center	$PF_t = \sum PF_{jt}$ <p> PF_t = Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Center di tahun berjalan PF_{jt} = Pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Center di tahun berjalan </p>	Informasi dan dokumen pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Center di tahun berjalan

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Cara Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kelembagaan Ditjen PPI	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen PPI	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi pada penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
2		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PPI	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PPI yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan
3		Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Ditjen PPI	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan
4		Penilaian Kepuasan Stakeholder Ditjen PPI	$S = \frac{\sum P}{Q}$ <p>S = Rata-rata kepuasan Stakeholder terhadap dukungan Ditjen PPI terhadap perundingan perdagangan internasional P = Penjumlahan nilai dari seluruh responden Q= Jumlah responden</p>	Data survey kepuasan terhadap stakeholder Ditjen PPI

Lampiran 2

Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2023



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Jalan M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Tel. 021-235228600, Ext. 36900 Fax. 021-23528610
www.kemendag.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 **NOMOR : PR.02.01/750.1/PPI.1/PK/12/2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Satria
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Djatmiko Bris Witjaksono
Jabatan : Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

Selaku *atasan langsung* pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2022

Pihak Kedua

Djatmiko Bris Witjaksono

Pihak Pertama

Ari Satria

Lampiran 3

Lampiran Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2023

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

KEGIATAN: PENINGKATAN PERAN DAN PEMANFAATAN PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menurunnya hambatan akses pasar di negara mitra	Jumlah barang yang masuk didalam perjanjian perdagangan Indonesia (i.e. mendapatkan preferential tariff) baik di bilateral maupun regional	Pos Tarif	500
2	Meningkatnya implementasi pemahaman perdagangan internasional	Facilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional	Ratifikasi	7
		Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi hasil perundingan	Pelaku Usaha	1000
		Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Center	Pelaku Usaha	1000

KEGIATAN: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kelembagaan Ditjen PPI	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Ditjen PPI	Indeks	80
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PPI	Nilai	90
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Ditjen PPI	Nilai	80
		Nilai Kepuasan Stakeholder Ditjen PPI	Nilai	80

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	84.768.839.000
2	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional	56.323.562.000
JUMLAH		141.092.401.000

Jakarta, 29 Desember 2022

Direktur Jenderal
Perundingan Perdagangan Internasional



Djatmiko Bris-Witjaksono

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perundingan Perdagangan Internasional



Ari Satria

Lampiran 4
Formulir Pengukuran Pencapaian Kinerja Sekretariat Ditjen PPI 2023

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional					
1	Menurunnya hambatan akses pasar di negara mitra				
	Jumlah barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia (i.e. mendapatkan preferential tariff) baik di bilateral maupun regional.	Pos Tarif	500	351	70
2	Meningkatnya implementasi dan pemahaman perundingan perdagangan internasional				
	Fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional	Ratifikasi	7	7	100
	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi hasil perundingan	Pelaku Usaha	1000	2.150	215
	Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Center	Pelaku Usaha	1000	1.474	147
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional					
3	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kelembagaan Ditjen PPI				
	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Indeks	80	84,58	105
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	90	92,27	102
	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Ditjen PPI	Nilai	80	90,64	113
	Penilaian Kepuasan Ditjen PPI	Nilai	80	80,01	100

Sumber: Ditjen PPI (2024)



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA